



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 17 Februari 2020
Waktu	: 14.00 s.d 18.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK. IV)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2020
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI:

53 Anggota dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

12 dari 12 orang Anggota:

1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
3. Drs. I Made Urip., M.Si.
4. Ir. Effendi Sianipar
5. Ono Surono, S.T.
6. H. Yadi Srimulyadi
7. Ir. Mindo Sianipar
8. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
9. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
10. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
11. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.

12. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

8 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Firman Soebayo, S.E., M.H.
4. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
5. Ichsan Firdaus
6. Budhy Setiawan
7. Ir. Panggah Susanto, M.M.
8. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

5 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Fauzih H. Amro, M.Si.
4. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
5. H. Charles Meikyansah

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil Ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
4. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
5. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

5 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
4. Muslim, S.Hl., M.M.
5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

5 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

4 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.
4. Slamet Aryadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian RI) beserta jajaran;
2. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
3. Aas Asikin Idat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (*Holding Company*);
4. Oksan O. M. Panggabean, Plt. Direktur Utama PT Berdikari (Persero); dan
5. Poernomo Direktur Keuangan dan SDM PT Pertani (Persero).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Pertanian beserta jajaran serta Direksi BUMN yang hadir pada siang ini.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat *waa'fiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Masa Persidangan II tahun 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Bamus pada tanggal 16 Desember 2019 dan keputusan Rapat Internal, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2020, pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2020 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas program kerja tahun anggaran 2020.

Bapak/Ibu yang saya muliakan.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini Rapat Kerja Komisi IV telah dihadiri dan ditandatangani oleh 48 anggota dari 9 fraksi. *Insyallah* kita akan menjadi wakil rakyat yang baik dan bertanggung jawab, bukan begitu Pak Menteri?

Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia rapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum, anggota setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat kerja hari ini dimulai pada pukul 14.00 WIB dan akan diakhiri pada pukul 18.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 ayat 1 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda Rapat Kerja hari ini.

3. Tanggapan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Jawaban Menteri Pertanian.
5. Kesimpulan.
- 6 Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/I bu yang saya hormati.

Rapat Kerja ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Februari 2020 yang lalu dengan agenda membahas usulan rencana kerja program serta usulan rencana perubahan komposisi anggaran tahun 2020. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara spesifik meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi atas rencana program dan kegiatan serta perubahan komposisi pagu tahun 2020 kepada program yang menitikberatkan dan manfaat langsung kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah salah satunya perbaikan infrastruktur pertanian, karena Pak Menteri bibitnya bagus, pupuknya bagus tetapi kalau saluran airnya tidak ada ya wassalam, tidak mungkin panen.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan sebelum diajukan kembali ditahun selanjutnya, serta menolak program dan kegiatan yang telah gagal dijalankan pada tahun sebelumnya. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggaris bawahi beberapa point diskusi dan keputusan Rapat Dengar Pendapat sebelumnya yang kami nilai belum mendapat perhatian khusus, antara lain:

1. Berkenaan dengan upaya pencapaian produksi untuk beberapa komunitas dimana hal ini menjadi perhatian bersama, namun demikian peningkatan produksi tersebut hendaknya direncanakan sedemikian rupa secara terencana dengan baik dengan melihat potensi produksi yang realistis. Jadi jangan nanti potensinya dibuat setinggi langit, pencapaiannya hanya sekaki bukit, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan ketahanan pangan Indonesia kedepan.
2. Komisi IV meminta agar pencapaian produksi komoditas pertanian disampaikan dengan menggunakan angka yang *real* bukan data yang diolah untuk tujuan tertentu sehingga menimbulkan kerancuan dimasyarakat. Kami minta kepada saudara Menteri Pertanian agar memperhatikan hal tersebut diatas dengan cermat agar tidak mengulangi lagi.

Saya tegaskan lagi saya selaku Pimpinan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa periode lalu. Anggap saja periode yang lalu sudah selesai, kami minta seluruh Eselon I,

Eselon II dan Eselon III bekerja yang baik dan bertanggung jawab. Jadi jangan ada yang bohong-bohong kepada menteri yang baru ini, menteri baru ini bukan malaikat semua tahu, tidak, pasti ada juga yang tidak tahu. Tolong data secara transparan disampaikan kepada menteri, gagal ya gagal, bisa dilanjutkan, dilanjutkan, bisa ditingkatkan, ditingkatkan.

3. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak permasalahan dilapangan berkenaan dengan beberapa kegiatan atau program pada masa terdahulu seperti program bekerja atau bantuan ayam yang nilainya hampir 850 miliar, lahan rawa dan *siwab*, disamping itu implementasi dari program tersebut dinilai tidak mencapai sasaran yang kita inginkan bersama.
Sehubungan dengan itu, Komisi IV meminta untuk tidak melanjutkan program yang gagal tersebut pada masa tahun 2020 dan masa yang akan datang sebaiknya anggaran dialokasikan kepada program yang berdampak pada sasaran peningkatan produksi serta memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Terkait dengan program ketahanan pangan yang dilakukan di areal perkarangan dimana Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendapatkan laporan bahwa kegiatan tersebut di beberapa tempat hanya berfungsi sebagai etalase, banyak yang gagal daripada berjalannya. Oleh sebab itu, perlunya evaluasi kegiatan tersebut dan merealokasi anggarannya untuk program diversifikasi pangan yang lebih berdaya guna dan bermanfaat.

Berkenaan dengan kelangkaan pupuk yang merupakan salah satu permasalahan klasik dalam pembangunan pertanian, Komisi IV menyadari bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya bekerja keras namun masih saja ditemukan permasalahan tersebut di tingkat lapangan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah program kartu tani, tujuannya sangat bagus namun harus diperhatikan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Saudara Menteri Pertanian.

Beberapa waktu lalu kami RDP dengan seluruh *holding* pupuk juga bersama dengan Himpunan Bank-bank Negara termasuk dengan Bapak Dirjen masih banyak kendala dalam penyaluran kartu tani terutama untuk pembelian pupuk terutama wilayah-wilayah yang agak kepinggir. Oleh sebab itu Komisi IV meminta Kementerian Pertanian agar terus melakukan pengamatan dalam implementasinya dan menyarankan agar pelaksanaan kartu tani tersebut ditahun 2020 ini secara bertahap dimulai dari Pulau Jawa dulu karena laporan dari Himbara pada waktu itu di Pulau Jawa saja baru 60 %. Dari 60 % tersebut masukan dari teman-teman Komisi IV yang daerah pemilihannya Pulau Jawa baru sebagian kecil yang menggunakan kartu tani.

Komisi IV secara khusus mencermati penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani yang berhak mendapatkannya. Kementerian Pertanian sebagai

institusi pemerintah yang paling berkompenten menentukan alokasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani harus memiliki data yang akurat. Maka dalam RDP kayak kemarin kami mintakan data sebelum rapat kerja diserahkan, baik jumlah petani maupun jumlah pupuk yang dibutuhkan.

Semua kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan secara transparan, jangan ada rekayasa termasuk jangan ada direksi, dan pihak Kementerian Pertanian maupun *holding* pupuk yang bermain. Data yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan demi tercapainya produksi. Karena ada laporan menteri bahwa disuatu wilayah yang menentukan itu *holding* pupuk atau pabrik pupuk setempat yang mana dianggap tidak kompeten sebagai penyalur pupuk.

Terkait dengan program peningkatan ekspor 3 kali, Komisi IV mendukung rencana tersebut karena sejalan dengan tujuan pemerintah dalam rangka meningkatkan devisa negara. Namun melihat realitas produksi dan situasi perekonomian dunia pada saat ini, Komisi IV menyarankan Kementerian Pertanian agar mengevaluasi kembali target tersebut serta menetapkan target peningkatan ekspor yang lebih realistis.

Sejalan dengan hal tersebut agar Kementerian Pertanian memperhatikan prakondisi komoditas pertanian yang akan di ekspor yaitu kecukupan dalam kuantitas yang dibutuhkan pasar internasional serta *continue*, hal tersebut menjadi landasan utama bila kita meningkatkan ekspor. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian perlu mempersiapkan langkah konstruktif ke arah tersebut, hindari kegiatan-kegiatan yang bersifat *ceremonial* dan dinilai tidak memacu peningkatan ekspor komoditas pertanian secara langsung.

Hadirin yang berbahagia.

Pada rapat sebelumnya Komisi IV telah meminta pemerintah untuk menyerahkan tentang kawasan perkebunan kelapa sawit, menyerahkan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Bumdes serta meminta penjelasan terkait pembentukan Badan Pangan Nasional yang seharusnya telah dibentuk sesuai dengan Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012. Ini sudah 8 tahun Undang-undang diketuk tetapi sampai hari ini belum ada realisasinya. Selain itu Komisi IV juga meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data kredit usaha rakyat atau KUR temuan Inspektorat Jendral serta evaluasi kinerja tahun 2015-2019 dan stok kebutuhan daging karena tidak lama lagi kita akan menghadapi puasa dan lebaran. Kalau datanya tidak valid yang akan kena masalah menteri bukan Eselon I-nya.

Jadi tolong data yang konkrit, konkrit dan tidak ada mark up data. Data impor daging, data populasi sapi nasional dan data negara yang bebas penyakit mulut dan kuku. Karena menurut laporan WHO, India tidak termasuk wilayah yang bebas PMK. Saya ada datanya nanti saya print, jadi Pak Ketut nanti jangan *ngotot-ngotot* lagi masalah PMK serta menyampaikan data wajib

tanam dan realisasi tanam bawang putih tahun 2017-2019 baik yang dibiayai APBN maupun bukan wajib tanam oleh importir bawang putih sesuai lokasinya.

Saudara menteri.

Kemarin dalam RDP kita sudah putuskan bersama ada pemisahan. Kalau ekspor, importir wajib tanam tidak boleh ada diwilayah APBN karena temuan BPK ada yang mengaku-ngaku bahwa inilah wilayah tanam saya, padahal ini dibiayai oleh APBN. Jadi waktu itu kesimpulannya dipisahkan, nah ini tugasnya Pak Irjen juga ini. Pak Irjen manggut-manggut, dananya ... hanya 105 miliar bagaimana mau ada temuan ongkosnya saja sudah mahal.

Bapak/ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut diatas. Silakan.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H, M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Annawasuqrolillah.

Wallaquwwata ilabillah.

Robbissrohli sodri wayassirliamri.

Pimpinan, Ketua, dan segenap Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sama saya muliakan, saya hormati dan banggakan, Pejabat Kementerian Eselon I, II dan lain-lain yang sempat hadir, Para Pimpinan Mitra Kerja Kementerian Pertanian dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat *waa'lfiat*.

Mengawali Rapat Kerja pada hari ini, perkenankan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Rapat kerja sore hari ini dengan agenda membahas program kerja tahun anggaran 2020.

Pimpinan dan Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini, saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Komisi IV DPR RI yang telah menyampaikan berbagai saran dan masukan sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tanggal 12,13 Februari 2020. Semua saran dan masukan yang konstruktif dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI selama RDP tersebut telah kami tindak lanjuti dan menjalankannya menjadikan perbaikan program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2020. Selain itu beberapa permintaan berupa data dan hasil evaluasi juga telah kami sampaikan diantaranya:

1. Data stok dan kebutuhan daging nasional, data impor daging dan populasi ternak, data wajib tanam dan realisasi tanam bawang putih, data kredit usaha rakyat atau KUR dibidang pertanian serta data rekapitulasi temuan Inspektorat Jendral yang diperoleh selama periode 2015-2019
2. Evaluasi kinerja Kementerian Pertanian 2015-2019 sementara itu sesuai dengan kesimpulan RDP, evaluasi program kerja serasi serta cetak sawah akan kami lakukan evaluasi secara komprehensif.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati.

Saran-saran ketua akan menjadi catatan yang sangat serius untuk saya dan *insya allah* bersama seluruh Anggota Komisi IV, saya tentu ingin berharap semua masalah yang ada pada kementerian ini adalah bagian yang juga terkait dengan Komisi IV, saya pertanggungjawabkan itu ketua. Oleh karena itu jangan dibiarkan saya memang salah.

Saya berharap kita bersama-sama dengan tahapan yang ada, dengan kemampuan yang ada, dengan agenda yang tersusun secara baik dan berstruktur, kita mampu pecahkan masalah-masalah yang cukup kompleks. Masalah pertanian, masalah yang sangat kompleks dan sangat luas. Dibawah kami ada 37 juta orang *on farm*, dibawah kami hampir diatas 7 juta sawah, dibawah kami teresonansi hampir ribuan trilliun Rupiah.

Oleh karena ini bukan pekerjaan kecil membutuhkan kebersamaan yang sangat tinggi, pemahaman yang dalam diantara kita dan saya siap bekerja ketua bersama Komisi IV, saya tidak bisa bekerja sendiri, saya membutuhkan tangan-tangan, kita menghadapi semua tantangan.

Bicara pertanian adalah bicara lapangan, kita bicara dengan dinamika yang saling fluktuasif, setiap saat tidak rata seperti apa adanya, tidak bicara seperti dalam ruangan saja. Kita berhadapan dengan cuaca, kita berhadapan dengan iklim-iklim yang berubah bahkan kita berhadapan dengan hama yang setiap saat mengancam. Kita berhadapan dengan orang-orang yang mau mengambil kepentingan terhadap masalah pertanian ini dan saya yakin sebagai Menteri tidak mungkin sendiri. Saya yakin ini adalah persoalan bangsa karena ditangan kita 267 juta orang perutnya kita pertaruhkan dan itu akan menjadi tanggung jawab saya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini memang saya butuh Komisi IV yang kuat, yang memberikan *advice* sekaligus menunjukkan jalan bersama bagaimana memecahkannya secara bertahap. Saya menjadikan pesan khusus ditempat ini sebelum saya lanjutkan berhenti pura-pura, berhenti bohong itu menjadi bagian-bagian yang akan saya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang semua saya hormati.

Selanjutnya izin kami menyampaikan beberapa masalah disektor pertanian yang menuntut kerja keras jajaran Kementerian Pertanian serta tentu saja dukungan Komisi IV DPR RI yang terhormat. Berbagai permasalahan tersebut diantaranya anitispasi dampak Virus Corona, Covid-19 di Cina yang diduga berdampak pada perdagangan pertanian kita, sebagai contoh ekspor kelapa sawit yang selama ini memberikan kontribusi terbesar bulan pada Februari 2020 ini, realisasinya hanya 84.000 ton padahal periode yang sama tahun 2019 mencapai 371.000 ton begitu pula dibandingkan dengan ekspor Januari 2020 sebesar 483.000 ton, ekspor sawit kita bulan Februari 2020 jauh mengalami penurunan.

Untuk itu Kementerian Pertanian berupaya mengambil langkah kebijakan untuk mengantisipasi penurunan ekspor pertanian ke Cina melalui koordinasi dengan para eksportir untuk memanfaatkan pasar ekspor alternatif seperti ke India, Timur Tengah dan Rusia. Pada sisi-sisi lain Indonesia memiliki ketergantungan impor bawang putih dari Cina juga perlu antisipasi yang baik. Data impor Februari 2020 sebesar 23.000 ton jauh lebih kecil dari impor tahun sebelumnya yang sebesar 583.000 ton berpotensi mengganggu ketersediaan bawang putih dalam negeri. Kementerian Pertanian juga telah mengantisipasi dan mencari alternatif importasi bawang putih selain mendorong produksi dalam negeri.

Hal penting lain yang harus menjadi perhatian secara terus menerus dari Kementerian Pertanian adalah mencakup ketersediaan pangan bagi 267 juta penduduk dan mengantisipasi gejolak harga. Kita semua tahu beberapa bulan kedepan kita akan menghadapi 2 momentum penting yaitu menghadapi bulan puasa dan *big session* Idul Fitri pada bulan April dan Mei, namun sebelumnya kita juga menghadapi panen raya pada bulan Maret sampai April. Dalam hal ini Kementerian Pertanian telah mengambil langkah antisipatif diantaranya meliputi:

1. Menjaga ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan sampai dengan bulan Mei 2020. Praknosa saat ini 11 bahan pokok diperkirakan tercukupi walaupun untuk bawang putih, daging sapi atau kerbau dan gula pasir sebagian kecukupannya masih didatangkan dengan melakukan impor.
2. Kementerian Pertanian juga melakukan antisipasi untuk menjaga stabilitas harga pangan yang rentan mengalami fluktuasi seperti cabai, bawang putih, gula, daging ayam, daging sapi dengan melalui:

- a. Melanjutkan gelar pasar murah pada bulan Februari dan bulan-bulan selanjutnya.
 - b. Merencanakan pasokan atau produksi dalam negeri melalui daerah-daerah sentra produksi cabai, bawang merah dan komodisi hortikultura lainnya.
3. Terkait dengan upaya mengantisipasi panen raya pada bulan Maret dan April Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah penting diantaranya:
- a. Sinergitas dengan penggilingan petani, obteker lembaga keuangan untuk stabilisasi harga gabah saat panen raya.
 - b. Penyerapan gabah petani bekerja sama dengan Bulog.

Hal yang tidak kalah penting lainnya untuk dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah antipasi timbulnya masalah penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi tahun 2020 terkait hal tersebut Kementerian Pertanian melakukan langkah antisipatif menghitung kembali alokasi pupuk bersubsidi karena adanya release terbaru lahan baku sawah Kementerian ATR dan BPN seluas 7,46 juta hektar dan sudah tidak teralokasinya pupuk bersubsidi untuk petani tambak. Saat ini karena masih di awal tahun anggaran ketersediaan pupuk bersubsidi masih aman namun kewaspadaan dan pengawasan terus menerus harus tetap dilakukan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Selanjutnya izin kami memaparkan rencana kerja dan anggaran atau RA/KA Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020:

Ketua dan segenap Anggota Komisi IV.

Saya hanya ingin menambahkan masalah beberapa rekomendasi yang kelihatannya memang harus menjadi kewaspadaan kami semua. Besok itu harga cabai yang kemarin, harga bawang putih yang naik sebenarnya dalam data Kementerian Pertanian cukup, yang mengherankan kenapa tiba-tiba terjadi lompatan seperti itu?

1. Ini menurut saya adalah *panic buying*, ada kepanikan public, distributornya juga mengurangi penjataannya kepasar karena dia takut besok kena corona tidak ada lagi impor yang bisa masuk.
2. *Public* juga seperti itu takut kehilangan bawang putih sehingga membeli lebih cepat padahal data yang ada pada kami adalah 120.000 ton masih ada ditangan importir yang ada. Kemudian kita akan panen pada bulan Maret ini sampai April kira-kira 30.000 ton, penggunaan perbulan adalah 47.000 lebih. Kalau begitu daya tahan kita sampai 3 bulan kedepan masih cukup menurut kita tapi karena desakan yang ada kepanikan itu kita mengeluarkan RIPH sudah keluar untuk menutupi yang ada. Mudah-mudahan ini sebuah langkah yang mungkin bisa dilakukan.

Besok kita akan menghadapi bulan puasa dan ramadhan, oleh karena itu berbagai cadangan 10 bahan baku dasar mau atau tidak Ketua dan para

Anggota Komisi, kami harus mempersiapkan padahal kesemuanya ini kalau mau dihitung bukan hanya Kementerian Pertanian yang harus lebih dominan ada kementerian lain sebenarnya, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Gula besok bersoal, bawang putih bersoal, daging bersoal kami butuh daging, kita makan daging 700 ribu ton, ketersediaan kita 400 ribu mau atau tidak 300 ribu harus impor, tetapi data kita juga masih menunjukkan seperti itu tetapi ini ada kepanikan dan kita tidak boleh berspekulasi.

Oleh karena itu izin Ketua terpaksa ini harus dilakukan tidak berarti tanpa upaya untuk terus mendrop agar impor kita bisa kurangi dan ketergantungan pada yang lain bisa kita hilangkan.

Pimpinan dan Anggota Dewan

Demikian juga halnya pupuk, pupuk dalam data yang ada dikita baru kita realisasikan antara 5 % sampai 15 %, kenapa sudah langka dilapangan? Nah itu saya mohon juga pemahaman-pemahaman kita terhadap masalah ini. Izinkan saya menyampaikan begini, pupuk inikan kami yang membuat RDKK-nya, rencana untuk program pupuk itu sesuai dengan lahan yang ada. Tetapi yang membayarkan Kementerian Keuangan, yang menerima hasilnya itu adalah Menteri BUMN yang kasihkan itu industrinya itu yang membagi kebawahnya itu. Jadi kalau kami semuanya yang salah seperti ini, ini juga harus dimaklumi oleh Komisi IV.

Jadi impor bukan kami yang keluarkan izin impornya, kami yang dapat pupuk. Lain kali ini pupuk juga harus dibawah kendali Kementerian Pertanian biar saya bisa kendalikan secara maksimal, biarkan aku bertanggung jawab dengan baik disini. Tapi kalau sekarang yang distribusi siapa?

Nah begitu Ketua, minta maaf ini Ketua, ini gaya saja. Cuma ini yang harus penting harus dilakukan oleh kita, supaya kita harus hadapi ini sama-sama karena masalah pertanian tidak boleh spekulasi. 267 juta orang begitu salahantisipasi, estimasinya ini bersoal dan seperti itulah saya kira yang saya ingin perjelas kedua, selain anggaran yang ini ketua. RKA itu saya kira sudah dibahas, saya mohon saya cuman ikut sama Komisi IV, apasih yang menurut kita tepat, yang benar.

Oleh karena itu saya tidak ingin bacakan seluruh Ketua, ingin 4 aspek itu peningkatan produksi, saya harap ditengah-tengah kita ini ada ...7%-lah dari yang kemarin, tidak gampang tetapkan inikan prosesnya 5 tahun Ketua. Saya berharap...kita turunkan dari biasa diatas 10-12%, kita turunkan selama 5 %. Ini hanya kalau ada intervensi budidayanya intervensi mekanisasinya bisa dilakukan dan tentu saja antara lain juga dengan peningkatan SDM yang harus ada. Untuk mencapai sasaran umum pembangunan pertanian tersebut, ada 4 aspek yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pertanian:

1. Meningkatkan produksi dan ...melalui gerakan nasional peningkatan prioritas dan produksi komoditas pertanian serta meningkatkan kapasitas SDM pertanian.

2. Menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi dan mengembangkan kawasan berbasis korporasi.
3. Pengembangan dan ... mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi.
4. Ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan irigasi, embung dan bangunan air lainnya.

Pada tahun 2020 Kementerian Pertanian tetap menjalankan tugas utama menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, dan telah merancang target produksi beberapa komoditas pangan utama yaitu target produksi pada padi ditetapkan sebesar 59,15 juta ton, jagung 24,17 juta ton, kedelai 0,42 juta ton, bawang merah 1,66 juta ton, cabai besar 1,35 juta ton, serta komoditas strategis lainnya yang ditarget pada tahun 2020 meningkat rata-rata 7 % dibandingkan 2019 dan dalam rangka mendukung pencapaian target produksi tersebut dan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah melalui penanganan aspek pasca panen, pengolahan dan pemasaran Kementerian Pertanian juga menetapkan beberapa target utama 2020 antara lain :

- a. Serapan kredit usaha atau KUR tahun 2020 sebesar 50 triliun.
- b. Target penurunan ... untuk hasil panen sub sektor tanaman pangan khusus padi mencapai 10 %, sub sektor hortikultura 28 %, dan sub sektor perkebunan dengan target sebesar 2 %.

Tidak hanya target produksi dan pasca produksi, Kementerian Pertanian juga berupaya memberi kontribusi dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan menurunkan *stunting* serta upaya mendorong penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2020 Kementerian Pertanian melalui program *family farming* dan pertanian masuk sekolah atau PMS di 727 kecamatan diharapkan dapat menurunkan daerah rentan rawan pangan menjadi 16 %. Selain dengan menargetkan usaha pertanian sekarang di 1600 lokasi diharapkan dapat berkontribusi menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 28 %. Pada sisi penyerapan tenaga kerja Kementerian Pertanian pada tahun 2020 ini menargetkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian 38,24 juta orang.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Tahun 2020 Kementerian Pertanian memperoleh anggaran sebesar 21,05 triliun yang terdistribusi pada 11 Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

1. Dirjen tanaman pangan sebesar Rp5,76 triliun.
2. Dirjen hortikultura sebesar Rp1,08 triliun.
3. Dirjen perkebunan sebesar Rp1,53 triliun.
4. Dirjen peternakan dan kesehatan hewan sebesar Rp2,02 triliun.
5. Dirjen prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp3,50 triliun.
6. Badan BPSDM Pertanian sebesar Rp1,70 triliun.
7. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp1,80 triliun.

8. Badan ketahanan pangan sebesar Rp0,63 triliun.
9. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp1,03 triliun.
10. Sekretaris jendral sebesar Rp1,86 triliun
11. Inspektorat jendral Rp105,32 miliar

Perlu kami laporkan pula bahwa dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian tahun 2020 Kementerian Pertanian juga didukung dana subsidi pupuk dan alokasi khusus DAK pertanian. Untuk subsidi khusus telah dialokasikan anggaran 2020 sebesar Rp26,63 triliun dengan volume pupuk 7,95 juta ton. Untuk DAK pertanian pada tahun 2020 juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang diperuntukkan bagi DAK provinsi sebesar Rp384 miliar dan untuk DAK kabupaten kota sebesar Rp1,12 triliun. Penggunaan dana DAK oleh daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan, perbaikan infrastruktur dasar, pertanian dan sarana produksinya.

Pimpinan dan Anggota dewan yang kami hormati,
Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang kami muliakan.

Dalam rangka mengakselerasi dan mengoptimalkan pembangunan pertanian 2020 melalui Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 telah diterima berbagai saran dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat. Untuk itu melalui kesempatan Rapat Kerja ini izinkan kami mengusulkan realokasi komposisi tahun anggaran 2020 antara Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Sekretariat jendral diusulkan melalui penambahan 25 miliar, yang digunakan untuk pengadaan infrastruktur pengembangan pusat data dan informasi pertanian.
2. Badan BPSDM Pertanian diusulkan melalui penambahan anggaran sebesar 125 miliar yang digunakan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan petani.
3. Badan ketahanan pangan melalui penambahan 100 miliar yang digunakan untuk mendukung program terobosan pengentasan daerah rentan rawan melalui *family farming*.

Penambahan anggaran pada 3 Eselon I tersebut diambil dari anggaran Dirjen Tanaman Pangan, dan Dirjen Prasarana dan Sarana pertanian. Besar harapan kami Ketua dan segenap Anggota kami melalui Rapat Kerja ini realokasi komposisi anggaran yang kami usulkan mendapatkan persetujuan Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa Hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja pada hari ini. Apabila diperlukan penjelasan lebih rinci saya mohon berkenan Pimpinan agar pejabat Eselon I... juga dapat memberi penjelasan tambahan yang dibutuhkan. Sekali lagi Bapak Ketua mengakhiri ini, pada prinsipnya nanti akan jalan sendiri, saya jamin itu Pak. saya akan

selalu bersama Bapak sekalian baik didalam konsepsi dan program maupun bersama-sama dilapangan.

Izinkan saya Menteri Pertanian Indonesia dan milik kita semua, *insya allah* seperti itu biar jelas Ketua. Atas perhatian dan segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya minta maaf, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wabillahiwaltaufiqhidayah, sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara menteri atas penjelasannya. Cuman ini saya jelaskan kepada Dirjen PKH, Pak Ketut. Pak Ketut saya lagi bicara, tolong handphone ditaruh. Ini data dari *world organization for animal health* negara-negara yang masih dalam kontrol bukan bebas PMK, masih dibawah pengawasan antara lain China, India, Monggol, Maroko, Namibia dan Thailand ini belum bebas PMK masih dalam kontrol ini saya dapatkan dari perguruan tinggi karena saya penasaran, kenapa ada yang bilang bebas PMK? ini masih dalam pengawasan.

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 257 yang selalu diprotes oleh Anggota, tapi ini adalah tatib. Kalau saya tidak bacakan berarti saya tidak mengerti peraturan. Pasal 257 peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, setiap Anggota diberi waktu bicara atau mengajukan pertanyaan selama 3 menit tetapi untuk pendalamannya, silakan 2 jam pun boleh. Saya tidak batasi kalau sudah pendalaman tetapi awal harus mengikuti tatibnya. Yang pertama Pak Hermanto, ingat 3 menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

3 menit lebih sedikit.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua Pimpinan, dan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri bersama jajarannya.

Alhamdulillah ini lengkap, ruangnya sangat penuh baik diruangan bawah maupun dibalkon nih. Ini menandakan Pak Menteri betul-betul mendapat dukungan luar biasa dan juga Anggota yang hadir juga melebihi dari jumlah yang normal. Sudah berapa menit itu?

Baik Pak Menteri, saya ingin menyampaikan bahwa pertama sejak pertemuan awal dengan Pak Menteri, saya ingin minta ketegasan dari

Kementerian melalui Pak Menteri apa yang sebenarnya menjadi fokus agenda utama kita terkait dengan produk-produk utama yang harus kita prioritaskan, pada masanya kita pernah punya 5 produk unggulan yang harus kita perjuangkan untuk bisa tercapai dan juga terakhir kita mempunyai 3 produk pertanian yaitu PAKJALE; padi, jagung dan kedelai.

Nah dalam agenda yang sekarang ini pun juga saya tidak mendapatkan penjelasan secara spesifik apakah ini mencakup dalam hal yang tidak langsung dalam agenda kita tersebut? tapi kami perlu ada suatu hal yang memang harus fokus kita capai begitu? apakah kita hanya mencapai PA-nya saja? Atau JA-nya saja? atau Le-nya saja? kitapun juga ingin supaya jelas, iya target-target kita. Apa yang saya maksud 3 hal Pajale itu adalah terkait dengan swasembada pangan kita, pertahunnya itu berapa dan sampai? saya pengalaman kemarin itu walaupun sudah ditetapkan fokus demikian, itu mengalami kesulitan untuk mencapainya Pak Menteri. Nah ini kita harus mendapatkan fokus sehingga apa yang kita kerjakan jelas.

Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan ini dana KUR ini adalah 50 trilliun. 50 trilliun ini melebihi dari anggaran kementerian 2 kali lipat lebih. Nah tentunya ini kita sangat bersyukur iya bahwa ada KUR yang untuk dialokasikan pada sektor pertanian dan kita berharap dana KUR ini juga bisa menjadi *leverage* untuk memberantas kemiskinan, tapi kami dalam hal ini belum jelas apa skinnya begitu? skinnya apa? 50 trilliun ini bukan barang yang sedikit. Jadi memang harus jelas juga skinnya apa? kelompok petaninya apa? apa yang dimaksudkan itu adalah berbasis korporasi seperti itu? Jadi kalau masuk kepada dunia korporasi, saya pikir ini nanti skinnya tidak cocok begitu. Jadi harus dijelaskan juga kepada kami, itu apa saja kriterianya? sehingga kami nanti bisa melakukan pengawasan sebagai Anggota Dewan.

Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa proposionalitas program pertanian ini mestinya berbasis kepada program masyarakat. Jadi karena kita sudah menetapkan target itu harusnya berapa bentuk jenis program, itu harus proposional lebih besar kepada berbasis masyarakat sehingga kita bisa untuk mendorong petani-petani ini bisa lebih bekerja serius untuk meningkatkan target-target kementerian kita disektor pertanian, itu yang ketiga.

Yang keempat saya minta juga ini ada usulan dari dapil di Sumatra Barat Pak Menteri itu adalah daerah rawan. Kemarin banjir dan itu melibas puluhan dan ratusan hektar dan kami minta nanti Pak Menteri bisa memberikan program perbaikan sawahnya didaerah Solok Selatan. Nah kemarin ada...disana, itu mohon nanti Pak Menteri bisa mengalokasikan program disana untuk perbaikan lahannya. Ada kurang lebih disitu kalau tidak salah 50 hektar yang rusak, kami mohon itu bisa diperbaiki. Nanti saya kasihkan ke Pak Menteri datanya, ini ada usulan dari pemerintahan setempat.

KETUA RAPAT:

Datanya tidak usah ke Pak Menteri Pak Hermanto, Pak Menteri sibuk.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ke Pak Ketua saja.

KETUA RAPAT:

Ke Eselon I saja.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Asik ke Pak Ketua saja tidak apa-apa.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Satu lagi Pak Ketua. Satu lagi ini karena kita ini adalah juga petani berbasis dengan dukungan penyuluh iya kan? nah kami minta juga ini penyuluh-penyuluh yang belum selesai persoalan baik honorinya, gajinya, statusnya ini minta diselesaikan juga Pak Menteri. Iya misalnya PMT itu belum selesai sampai sekarang urusannya.

Kemudian juga penyuluh perkebunan kemudian juga penyuluh SMD, Nah ini kami minta juga supaya ini diselesaikan supaya mereka juga ada yang belum mendapat asuransi Pak Menteri. Beritanya juga ada yang penyuluh perkebunan itu sakit dan patah tulangnya karena tugasnya tidak mendapatkan asuransi. Saya pikir ini kesedihan kita Pak, ini harus kita ucapkan rasa duka karena ini adalah sektor yang sangat penting buat kita. Demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Hermanto atas, memang kalau dokter bicaranya beda kelasnya, tidak seperti Ketua Komisi IV. Selanjutnya Pak Salim Fakhry silakan. Ini Partai Golkar yang masuk dalam jajaran DPP tidak seperti Pak Ichsan yang terbuang.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Izin Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Pimpinan yang kami hormati.
Pak Menteri dan jajarannya.

Tadi dalam pengantar Pak Menteri, Pak Ketua kalau kita simak Pak Menteri tidak ingin pisah dari Komisi IV dan ada satu yang menarik bagi saya pribadi Pak Ketua mari berhenti berpura-pura dan berhenti untuk berbohong. Ini sangat dalam Pak Ketua, bukan arti kita Komisi IV berbohong kepada Pak Menteri atau berpura-pura, termasuk para Eselon I juga Pak Menteri.

Bapak Menteri yang kami hormati.

Saya ada masalah apa Pak Ketua? Dalam kesimpulan rapat yang dahulu Ketua, kalau saya tidak salah 12 Februari dengan lugas dan tegas Pak Ketua ada kesimpulannya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang telah dilakukan sebelum diajukan kembali ditahun selanjutnya antara lain program bekerja serasi dan penerapan cetak sawah.

Pertanyaan saya Pak Ketua, apakah data ini sudah masuk ke Komisi IV? kita konsisten saja Ketua kalau memang ini belum masuk Pak Ketua, kalau kita sepakat kapan untuk dimasukkan? Cuman biasanya kalau sudah disampaikan kekesimpulan apakah ini cuman kalaupun ada di Sekretariat, di Anggota saya yakin belum ada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Salim Fakhry ini baru data yang diberikan ke kami ke Sekretariat hanya sedikit sekali belum komplit. Perihal cetak sawah dan lain-lain tadi yang dipertanyakan. Sabarlah mungkin nanti malam atau besok sudah bisa sampai, kalau tidak berarti Eselon I kerjanya tidak benar.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Itulah yang dimaksud.

KETUA RAPAT:

Tidak bertanggung jawab.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Itulah yang dimaksud Pak Menteri jangan berpura-pura tadi Ketua. Apakah Eselon I tidak menyampaikan ke Pak Menteri? itu yang saya maksud, selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Pak Irjen haruslah lebih independen Pak Menteri. Mengingatnya banyak temuan BPK yang luput dari temuan Staff Inspektorat Jendral harus menjadi perhatian kita bersama bahwa Irjen bukanlah alat untuk melindungi penyimpangan di Kementerian, namun dalam hal sebagai *warning* sebelum adanya temuan BPK, ada

beberapa kasus yang di sinyalir melindungi pelaksanaan program yang sifatnya sangat strategis contohnya masalah cetak sawah Pak Menteri.

Pelaksanaan program sifatnya strategis sementara itu kami dari Komisi IV mencermati anggaran saudara Irjen ini sangat-sangatlah minim. Dalam RDP hampir semua Anggota menginginkan anggaran Irjen ini untuk dinaikkan ini sekedar masukan kepada Pak Menteri.

Selanjutnya atas izin Pimpinan masalah bio organik, pengadaannya kalau saya tidak salah ini dipecah-pecah ini Pak Ketua di 4 Dirjen ada di TP, ada di PSP dan ada yang dilain-lain. Pertanyaan saya mengapa tidak disatu Dirjen saja Pak Ketua? Irjen saja, agar pengawasannya lebih efektif. Ini timbul pertanyaan ada apa ini Pak Ketua. Kita ingin jangan berpura-pura, jangan bohong tadi karena kita sayang sebab setiap pengantar Pak Ketua, Pak Ketua ini nampaknya galak cuman ketika ada menteri selalu kita bantu menteri, kita bantu menteri. Kalau untuk Eselon I mungkin ada laporan Pak Sekjen Pak Menteri tidak memang Pak Ketua Pak Menteri. Kalau sudah Ketua galak secara otomatis anak buah pun semakin galak Pak Menteri. Ini perlu Pak Menteri apa salah, kalau saya tidak salah ini bukan titipan Pak Dirjen PSP sama saya Pak Menteri, apa salahnya di Dirjen PSP saja?600 miliar disitu supaya enak untuk diawasinya. Ini dibagi-bagi inilah timbul pertanyaan Pak Menteri, apa ada motif atau yang lain-lain?

Selanjutnya Pak Menteri ada kalau kami tidak salah ada 5 surat duta besar Argentina, Australia, Chili, New Zealand, Amerika dan satu khusus surat duta besar dari Pakistan. Menanyakan kepada Kementerian mengapa izin rekomendasi IR IPH itu lambat ataupun belum dikeluarkan? Sementara ini mempengaruhi untuk ekspor kita ke 5 negara ini. Kami ingin ini dipertanyakan terutama yang dari Pakistan itu kalau saya tidak salah Pak Dirjen secara khusus mungkin sudah sampai laporan kepada Pak Menteri karena Pak Menteri katakan jangan bohong. Saya selalu pegang ini Pak Menteri asal rapat ini Pak Menteri. Hal lain Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Sudah 2,5 menit.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Iya ½ menit lagi Pak Ketua, kita nonton tv Pak Ketua. Kita baca Koran tanya hati nurani kita Ketua masalah harga cabai, bawang yang naik tadi Pak Ketua. Ini adalah tanggung jawab kementerian dan kita bersama bukan tanggung jawab seorang menteri saja Pak Ketua. Makannya kami Pak Menteri selalu dalam RDP kepada Eselon I mengatakan begini walaupun mungkin laporan Bapak-bapak Eselon I ini kepada Pak Menteri akhir-akhir ini begitu galak Anggota Komisi IV, tidak ada tujuan kami walaupun kadang-kadang iya termasuk Pimpinan Pak Hasan, Pak Fauziamro melihat kami berbicara apa begitu.

Tadi satu Pak Ketua, Pak Menteri katakan saya adalah Menteri Indonesia. Ini dalam Pak Menteri jangan seolah-olah mohon maaf Pak Menteri, Pak Menteri ini dianggap Menteri Nasdem itu tujuan Pak Menteri tadi dikatakan saya Menteri Indonesia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F.NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Asalnya NasDem untuk Indonesia.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Iya betul Pak, padahal kan saya sudah bilang kepada Pak Menteri, Bapak Menteri yang dititipkan Golkar di Nasdem Pak. Terakhir Pak Menteri ini terakhir Pak Menteri, Pak Hermanto tadi ada titipan dari dapil. Saya Aceh Pak Menteri khususnya kabupaten Aceh Tenggara penghasil jagung terbesar diprovinsi Aceh Pak Menteri, cuman karena jarang publikasi Pak Menteri ini tidak kelihatan seolah-olah Tanah Karo yang terbesar, padahal Aceh Tenggara yang terbesar Pak Menteri. Ini undangan Pak Menteri, kapan ada waktu Pak Menteri melaksanakan panen raya dikabupaten Aceh Tenggara. Ini resmi undangan dari dapil Pak Menteri tinggal diatur waktunya dengan Pak Sekjen.

Terima kasih Pak Ketua, mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Itulah hebatnya orang Aceh, mau ngomong satu tujuan muternya 3 provinsi dulu ujung-ujungnya ngundang, nanti Bansosnya ditambahin. Iya kesepakatan tersebut yang dipakai bukan ajang minta tambahan. Selanjutnya Mbak Alien Mus.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan Ketua.

KETUA RAPAT:

3 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Iya 3 menit berarti tidak usah pakai terima kasih

Yang saya hormati Pimpinan Anggota Komisi IV dan juga Bapak Menteri, Bapak Sekjen beserta jajaran Eselon I.

Izin Pak Menteri kami sudah melakukan rapat bersama Eselon I 3 hari berturut-turut minggu kemarin. Tentunya Bapak Dirjen Holtikultura masih mengingat pertanyaan saya tentang RIPH kepada 3 perusahaan tersebut yang mana RIPH importir buah itu ada perusahaan Laris Manis Utama, Chery Fruit dan Karunia Alam Raya Sejati. Saya apal pak tapi disini ada kejanggalan Pak Menteri bahwa dari ketiga perusahaan tersebut ada satu perusahaan yang betul-betul jumlah importnya itu melebihi daripada 2 lainnya. Kami ingin menanyakan bahwa kenapa ada salah satu perusahaan yang jumlah importirnya lebih dari 2 perusahaan tersebut? bisa saya sampaikan jumlah perusahaan Laris Manis Utama 11.000 ton jumlah importirnya terus Chery's Fruit 412 ton, Karunia Alam Raya Sejati 350 ton ini menjadi pertanyaan besar bagi kami Pak Menteri.

Terus tadi juga Pak Menteri menyampaikan kepada kami bahwa seperti yang abang saya sampaikan tidak ada kebohongan yang adalah kejujuran kalau kami di Komisi IV jangan ada dusta diantara kita pak istilah itu sekarang terkenal di Komisi IV. Kami juga melihat dari 100 perusahaan yang mengajukan untuk pengajuan mendapatkan RIPH ada 13 perusahaan 3 untuk buah, 10 untuk bawang putih. 10 untuk bawang putih ada beberapa perusahaan baru melakukan importirnya di Bulan Desember. Ini menjadi pertanyaan di Komisi IV Pak makannya saya sampaikan biar nanti supaya transparan, jangan sampai tadi ada tuduh menuduh atau ada saling curiga mencurigai biar di clearkan.

Terus kami juga menanggapi apa yang menjadi penyampain Bapak Menteri tadi dalam sambutannya, ada di beberapa dirjen, sekjen juga ada penambahan anggaran beserta ada 25 miliar untuk Sekretariat Jendral, BPSDM ada 125, ada juga untuk Badan Ketahanan Pangan ada 100 miliar kami ingin menyampaikan Pak bagi saya atau bagi kita memberikan advice bahwa penetapan program tahun 2020 perlu didasarkan atas evaluasi pelaksanaan program tahun 2019.

Program yang terlaksana dengan bagus berhasil agar dilanjutkan bahkan dikembangkan dalam bentuk yang lebih *massive*, program yang kurang berhasil agar disempurnakan namun dalam pelaksanaannya agar dikurangi jumlah dan volumenya. Program yang dinilai tidak berhasil atau gagal ditahun-tahun sebelumnya disarankan untuk tidak dilanjutkan lalu diganti dengan program yang lebih baik dan berdaya guna. Pada setiap program atau unit Eselon I komponen biaya untuk dukungan manajemen, pemantauan evaluasi dan pelaporan terlalu tinggi, tugas pokok dan fungsi kegiatan tersebut harusnya sudah melekat pada setiap organisasi Eselon I. Sebaiknya anggaran yang tersedia dialokasikan kepada pencapaian produksi secara langsung. Banyaknya item kegiatan karena beberapa kegiatan.

KETUA RAPAT:

Ini pertanyaan atau penyampaian atau pengulangan?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Penyampaian *advice*, tadi Pak Menteri meminta *advice*, jadi saya memberikan *advice*.

KETUA RAPAT:

Itulah hebatnya Golkar.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ketua ini memotong-motong waktu saya ini Ketua. Aduh dimana tadi ya? ini dipotong nih Ketua kayak begini nih. Jangan begini nih aduh Ketua nih, dari partai mana sih?

KETUA RAPAT:

Saya dari partainya Pemerintah sama dengan Pak Menteri.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Berarti tidak usah saya kasih *advice* dong?

KETUA RAPAT:

Tidak ini dilanjutkan atau sudah atau mau lanjut?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Lanjut dong.

KETUA RAPAT:

Oke satu menit lagi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Anggaran Sekretariat Jendral masih terlalu tinggi, satu satker saja diluar gaji anggarannya lebih besar dari Rp 500 miliar, benarkan Pak ya? padahal pada organisasi Sekretariat Jendral tidak ada program *fixed* dilapangan hanya merupakan perencanaan keuangan dan fasilitasi pelayanan kantor dipusat. Dimohon tanggapan Bapak Menteri yang paling kami hormati untuk hal-hal tersebut diatas dan saya ingin satu, 30 detik saja Pak, 30 detik. Saya pakai *timer* belum mati.

Saya mendapatkan laporan dari beberapa perusahaan atau aliensi perusahaan importir bahwa ada data yang disampaikan kepada saya soal 3 perusahaan buah alamatnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi

perusahaannya alamatnya misalkan ditempat ini tapi ternyata dicek bukan nama perusahaan tersebut.

KETUA RAPAT:

Seperti tadi Pak Menteri dari Golkar dititipkan NasDem begitu? Bukan?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya hanya ingin menyampaikan saja, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup? itulah hebatnya yang dibelakangnya Mba Alien, selanjutnya Ibu Endang silakan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri dan Eselon I yang saya banggakan.

Saya sangat *appreciated* dengan alokasi anggaran di Badan Litbang pertanian sudah naik. Namun sangat disayangkan Pak, saya baru saja berdiskusi dengan para peneliti bahwa tidak ada koordinasi yang baik antara Direktorat Jendral dengan Badan Litbang Pertanian sehingga banyak sekali *species-species* ataupun galur-galur yang sudah diekspos oleh Balitnak misalnya tidak dimanfaatkan oleh Dirjen Peternakan, Direktorat Jendral Peternakan. Jadi diantaranya disini ada beberapa galur-galur yang sudah diekspos kemudian bapak semestinya bersyukur sekali bahwa satu-satunya di Kementerian Pertanian yang punya Balai Bio Gent yang sudah terkenal di Asia.

Nah sekarang Pak tidak dimanfaatkan oleh struktur organisasi ada yang di Kementerian Pertanian di antaranya di Sekjen Pak. Jadi banyak sekali hasil-hasil dari varitas-varitas unggulan kita yang tersendat untuk disalurkan ke masyarakat karena peraturan-peraturan untuk uji multi lokasinya tidak dikeluarkan segera. Kemudian karena singkat ini Pak kami sudah menulis berapa tulisan kami dan juga.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang kalau sudah ditulis nanti diserahkan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Untuk dipelajari, bukan oleh Pak Menteri mempelajari. Percuma punya Eselon I kalau tidak mampu mempelajari.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik dan ini ada beberapa himbaunan dari beberapa peneliti dari Bio terima kasih akan saya sampaikan Pak.

KETUA RAPAT:

Apa, coba Pak Kepala Badan Karantina bantu terima perwakilan karena beliau tidak bisa jalan habis operasi. Iya sama sajalah. Terima kasih Ibu Endang. Selanjutnya tadi dari Golkar sekarang dari PDI Perjuangan Pak Hanis Lema silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri dan jajaran yang saya kasihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera buat kita semua.

Pak Menteri dari naskah yang diberikan, terus terang saya belum melihat ada perhatian yang fokus dan spesifik terkait dengan peningkatan kapasitas petani terutama jika dikaitkan dengan distribusi bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Pak. Saya masih melihat tekanan yang lebih kepada aspek teknis administrative, padahal kita tahu petani adalah aktor ataupun juga subjek dari pelaku pertanian ini. Karena itu saya mengusulkan perlu ada semacam capacity building yang harus dilakukan sehingga petani ini tidak sekedar diposisikan semata sebagai aktor penerima bantuan Pak. CPCL tentu perlu karena ini adalah persyaratan administratif tetapi juga harus dikombinasikan dengan pembinaan, pemberdayaan dari aspek aktor dalam hal ini petani Pak.

Kita tahu bahwa Presiden Jokowi itu mencanangkan SDM unggul Indonesia hebat. Saya kira Kementerian Pertanian juga harus bisa menerjemahkan petani unggul pertanian kita akan menjadi hebat. Karena itu saya ingin ada alokasi anggaran yang memadai untuk kemudian membuat para petani kita menjadi lebih berdaya, point yang pertama itu.

Yang kedua Pak Menteri, saya senang dan mengapresiasi penjelasan Pak Menteri. Saya melihat Pak Menteri ini sungguh sangat nasionalis, kata-

kata kunci yang Pak Menteri sebutkan itu swasembada, kemandirian, kedaulatan pertanian dan pangan yang tujuannya adalah secara sistematis memangkas ketergantungan kita kepada komoditas asing.

Pada level paradigma Pak Menteri, saya salut Pak Menteri. Tetapi pointnya adalah bagaimana menerjemahkan pada level paradigma menjadi level regulasi dan kemudian dari level regulasi menjadi level aksi implementasi. Saya ambil contoh satu Pak Menteri, Pak Menteri menargetkan 300 % peningkatan ekspor dalam waktu 3 tahun mendatang dan ketika kita bicara perkebunan, maaf kita bicara pertanian komoditas perkebunan itu adalah komoditas-komoditas yang menjadi andalan untuk ekspor tapi kalau saya catat Pak Menteri berdasarkan data dan fakta cakupan volume kegiatan itu masih cenderung kecil; kopi hanya 8.000 hektar, bakau 7.000 hektar, karet 10.000 hektar. Saya ingin mendapatkan sebuah penjelasan yang rasional, masuk akal kira-kira untuk mendongkrak peningkatan ekspor sampai 300 % ini apakah dengan intervensi seperti yang digambarkan ini, kita akan mencapai apa yang menjadi target Pak Menteri ini karena PR besar kita adalah bagaimana menerjemahkan pada level ideologis, diturunkan menjadi level regulasi dan aksi implementasi.

Yang berikut secara khusus saya ingin menyinggung soal peremajaan sawit Pak Menteri. Pertanyaan reflektif saya, sebenarnya peremajaan sawit ini penting atau tidak buat republik ini? Kalau penting mengapa peremajaan sawit ini disinyalir hanya targetnya mencapai 40% Pak? Apa akar persoalannya sehingga kok tampaknya masih jauh dari target.

Terkait dengan dana pungutan ekspor. Idealnya dana pungutan ekspor ini digunakan untuk peremajaan kebun plasma milik para petani dan bukan digunakan untuk produsen bio diesel. Karena selama ini Pak Menteri produk B-20 dan B-30 itu ternyata lebih banyak produsen sawit tidak membeli sawit kepada petani tetapi dari para pemilik perkebunan ataupun dari korporasi.

Nah ini saya ingin melihat wujud keperpihakan dari Pak Menteri terkait dengan hal ini bagaimana caranya agar produsen B-20, B-30 ini bisa membeli sawit dari para petani plasma Pak? Ini penting Pak, ini penting sekali karena bagaimanapun juga pertanian ini tidak saja hanya menghasilkan profit bagi korporasi tapi juga harus bisa membawa benefit untuk para petani.

Yang terakhir Pak soal dapil saya Nusa Tenggara Timur Pak. Saya mau kasih informasi ke Pak Menteri, hari ini di NTT itu gagal tanam bukan gagal panen Pak tapi gagal tanam, jadi tidak akan panen kenapa? Karena ada faktor iklim, biasanya di NTT itu hujan sudah mulai bulan November, tahun ini baru terjadi pada akhir atau penghujung bulan Januari. Dengan demikian hampir dipastikan gagal tanam dan dampaknya bukan tidak mungkin di beberapa daerah itu akan mengalami kelaparan Pak Menteri. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri terkait dengan hal ini, kira-kira langkah antisipatif apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian terkait dengan hal ini? yang kedua Pak Menteri tadi singgung soal stunting.

KETUA RAPAT:

Sudah hampir 3 menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Iya singgung soal *Poverty Eradication* Pak Menteri kalau bicara *stunting* dan angka kemiskinan, NTT itu hanya lebih baik dari Papua dan Papua Barat. Saya ingin menantang Pak Menteri kira-kira Pak Menteri bisa ga dengan program kementerian ini kerja bangun lahan Kering di Nusa Tenggara Timur sehingga tendangannya itu bisa memangkas sekian persen dari tingkat *stunting* dan kemiskinan di NTT. Hari ini kemiskinan NTT ada di angka 21,09% sementara kemiskinan nasional ada di 9%.

Kesimpulannya angka kemiskinan yang terus turun tidak dikontribusikan oleh Papua, Papua Barat dan NTT. 5 tahun belakangan ini kemiskinannya statis sementara kita tahu di Rapat Kerja pertama Pak Menteri katakan tujuan dari pembangunan ekonomi ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan kalau kita mau ujii coba. Saya ingin menantang NTT itu *before dan after*-nya itu bisa kelihatan kalau Pak Menteri turunkan katakanlah eskavator dan macam-macam pengembangan pola lahan kering dan seterusnya. Saya ingin mendapatkan narasi besar dari Pak Menteri terkait dengan komitmen terhadap ini, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ansy Lema, saya hanya membantu menjelaskan kebijakan BPDPKS itu bukan di Menteri Pertanian tapi di Kementerian Keuangan. Tapi salah satu timnya ada di Kementerian Pertanian yaitu Dirjen BUN yang mana waktu itu apabila rakyat ingin minta replenting persyaratannya itu berapa dulu 18 atau 20 pak? Jawabi dulu 28 persyaratan yang rasanya sangat sulit atau memang dipersulit oleh BPDPKS. Sekarang berapa persyaratannya pak? Dulu 14 sekarang 8. Jadi hal tersebut pernah kita panggil diruangan ini, kita sudah sepakat ingin bikin Panja agar keputusan Undang-undang yang dibuat itu membuat rakyat yang ingin mengadakan replenting supaya lebih mudah lagi tapi dengan catatan tidak boleh menyalahi aturan. Iya pak? Selanjutnya Pak Johan Rosihan, silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Pimpinan dan Anggota Komisi IV.

Yang pertama, di Sumbawa Pak Menteri ada sekitar 13.300 hektar lahan tanaman jagung karena kondisi cuaca ini hampir sekitar 70% lah diperkirakan akan gagal panen baru umur setinggi 50 cm dia sudah keluar bongkolannya Pak Menteri. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana

peran atau realisasi dari asuransi tani ini untuk memberikan jaminan kepada mereka agar mereka tidak terlalu khawatir dengan kondisi alam seperti Pak Menteri katakan bahwa bisnis pertanian ini adalah kita yang menyukseskan dengan alam, iya itu yang pertama.

Yang kedua dari yang data Pak Menteri sampaikan tadi itu bahwa target dari produksi dari beras kita itu tadi adalah 59,15 juta ton, iya Pak ya? nah kalau misalnya kita hitung produktivitas lahan kita 5 ton perhektar, maka dibutuhkan luas sawah itu 11,83 juta hektar sementara hari ini yang di release kemarin itu luas tanah kita itu cuman 6,5 juta hektar artinya dibawah 11 pak. Iya bagaimana kita menjelaskan ini dengan program intensifikasi atau apa begitu? yang jelas dengan produktivitas 5 ton gabah kering perhektar maka mencapai 59,15 juta ton itu ini perlu diberikan penjelasan yang lebih detail biar datanya sinkron.

Yang berikutnya Pak bicara tentang menyambung Pak Ansy Lema tadi itu tentang visi Presiden bahwa SDM unggul Indonesia maju atau Indonesia hebat lah bahasanya itu. Tapi kalau kita lihat anggaran dari Badan BPSDM kita hanya 1,8 miliar, tidak sebanding dengan dirjen-dirjen yang lain, bagaimana kita bicara tentang SDM unggul? SDM pertanian mana yang akan kita coba hasilkan dari sisi keunggulannya? Kita bicara ada program dalam konteks ini ada program *family farming*, ada bicara tentang petani millennial. Kita sudah bahas kemarin dengan dirjen itu Pak, apa bentuknya petani millennial ini? kalau saran saya Pak sudah perhatikan saja anak-anak petani itu bila perlu ada beasiswa khusus untuk anak-anak petani. Kita memberikan pendidikan-pendidikan khusus agar mereka bisa bangga menjadi petani. Tidak usah kita terlalu membuatkan kegiatan-kegiatan ceremonial dengan nama-nama yang wah begitu tetapi dia tidak berdampak terhadap peningkatan produksi, itu yang kedua.

Yang berikutnya tentang pertanian biaya murah Pak. Tentu yang kita butuhkan disini adalah peran-peran penyuluh yang seperti Pak disampaikan Pak Menteri awal sampaikan didepan itu Raker sebelumnya bahwa orang penyuluh itu adalah ujung tombak dari mewujudkan strategi pertanian kita ini, disamping BPP itu ada penyuluh-penyuluh lain Pak yang kita tidak perlu merekrut lagi tenaga-tenaga lain. Ada ini Pak dari aspirasi forum pendamping perkebunan yang mereka tuntut sederhana Pak; satu perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi petugas TKP dan PLP, TKP pendamping perkebunan karena wilayah binaan relatif kelas 1 orang membina 1-4 kecamatan tetapi mereka tidak punya BPJS Ketenagakerjaan, tolong ini kemudian juga diperhatikan

Belum lagi tentang aspirasi dari PMT yang sejak dari tahun 2018 tidak dapat honor. Nah tentu dengan program kartu tani, dengan KUR, dengan banyaknya sinergi-sinergi perbankan dengan pertanian itu dibutuhkan pendamping-pendamping karenanya mereka juga menuntut agar jelas statusnya dan mendapat honor bulanan bukan hanya peritem pekerjaan. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan Pak Menteri, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Johan.
Berikutnya Pak Mindo Sianipar.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih Pimpinan.

Beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya bisa 3 menit. Pertama sudah disimpulkan pentingnya penyuluh karena itu harus ada revitalisasi P4S, dimana sekarang P4S itu? Harus revitalisasi penyuluh-penyuluh dan apa namanya desiminasi teknologi itu dilakukan lewat P4S yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Tadi tentang honor-honor tadi, setahun yang lalu kami sudah ada tes dan sudah dinyatakan lulus passing grade tetapi belum ada SK-nya. Pada tahun lalu ada kata-kata mereka yang bagus sekali waktu saya bertemu, Pak Mindo katanya kita ini THL dan calon P3K, kita selalu mengatakan kepada sesama kita pulang malu ndak pulang rindu. Iya pulang dia malu karena pagi-pagi sekali dia sudah pakai baju yang mirip-mirip dengan pegawai pertanian kan begitu ya. Nah tapi kalau dia pulang kerumahnya tidak menghasilkan apa-apa. Sudah sekian bulan tidak gajian, nasibnya tidak jelas, kalau dia tidak pulang dia rindu kepada anaknya. Jadi tolong ini segera diselesaikan supaya tidak terus menerus mereka pulang malu, tidak pulang rindu kasihan juga ya, ini bagian dari revitalisasi penyuluh.

Yang kedua, bicara mengenai mengkorporasi petani itu kalau hanya satu sektor produksi saja ini Pak Menteri harus berani merubah paradigma. Teman-teman Eselon I rubah paradigmanmu tidak hanya berpikir dirimu, saya tantang Menteri ada 54 Anggota Dewan ini buat percontohan korporasi boleh ambil satu tempat, satu orang satu. Kalau saya dikasih kesempatan ditempat saya minta 10 yang saya minta yaitu mengkaitkan antara tadi cerita tentang jagung Pak Johan ini, Pak Johan takut jagungnya tidak berhasil. Ceritanya KUR tidak begitu berpikir korporasi, ada jagung, ada ternak ayam, ternak unggas, ada ternak itik, ada ternak domba, ada ternak sapi sehingga sewaktu orang panen jagung pada suatu daerah cluster yang kecil yang kita siapkan untuk berapa ratus hektar misalnya itu yang keluar dari cluster itu adalah nilai tambah tertinggi. Orang tanam jagung panennya lewat domba, orang tanam jagung panennya lewat telur, jadi mendapatkan nilai tambah lagi dicluster itu.

Kita harus berani pada tahun-tahun pertama kepemimpinan, kementerian ini membuat percontohan itu, baru bisa nanti kita multipikasi, baru kita bisa perbanyak, kalau tidak iya kembali lagi *use usual*, iya ini bagus. Sudah misalnya saya kasih contoh misalnya ya, ini sudah dibuatkan pupuk organik cair begitu ya, oke bagus saja begitu tetapi harus jelas kriterianya ya, tidak

sekedar pupuk hayati, harus ada nutrisi disana, harus ada enzim disana, harus ada hormon nabati disana, supaya tidak tanggung kalau merubah dari bentuk lama ke bentuk baru harus memperbaiki, dia akan memperbaiki tanah, dia juga akan memperbaiki mencapai kemampuan optimalnya untuk menghasilkan potensinya. Kalau potensi soalnya Padi potensi misalnya diarahkan 11 ton, dia mengarah kesitu.

Jagung Pak Menteri sebagaimana juga kemarin sudah di *release* untuk padi yang bukan *hybrid* bisa berulang-ulang dengan kapasitas lebih dari 8 ton untuk petani biasa seperti punyanya Pak Surono Danu. Terima kasih itu, saya kira jagung juga ada yang bisa seperti itu. Jangan jadi kita ketergantungan kepada tender-tender dari produk-produk tertentu, iya jadi untuk tanaman pangan. Saya ingin menyampaikan, jangan hanya diborong sampai 80 % lebih oleh satu merk yang lalu kan begitu, tidak bagus juga, kecuali di ovteker. Kalau di ovteker sekaligus good bagus sangat membantu, kan begitu ya. Variable itu harus menjadi perhatian Pak Menteri supaya kita betul-betul seperti itu.

Nah beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, terkait pupuk tadi itu ya. Mari kita jadikan pupuk yang bersubsidi itu lewat BumDes sehingga BumDes menjadi penggerak ekonomi didesa. BumDes menjadi penggerak ekonomi didesa dan Bumdes itu harus berbentuk badan usaha Koperasi jangan PT atau CV, dia harus betul-betul milik rakyat banyak disitu. Dengan dia menjadi penyalur bersubsidi, didesa itu tidak ada yang lain kecuali.

Pada saat yang sama dia juga bisa menyalurkan gabah petani ke Bulog dan Bulog sudah bersedia sudah ada pembicaraan tinggal Pak Menteri bicara lagi dengan disana. Seluruh petani di Indonesia menghasilkan gabah, menghasilkan beras tapi pada saat yang sama dia juga konsumen, karena itu dia bisa menjadi penyalur Bulog pula akan beras, bisa menjadi penyalur Bulog akan gula dan sebagainya dan sebagainya sehingga ini bisa mengurangi bahkan memotong pengaruh dari pedagang-pedagang besar yang sering disebutkan sebagai mafia pangan. Saya ragukan untuk kehadiran mafia pangan karena distribusinya saja yang tidak dikuasai. Saya kira begitu saja Pak Ketua, nanti dalam pendalaman saya akan bicara lebih banyak, ini supaya tidak lebih dari 3 menit, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih senior Pak Mindo.

Pak Menteri perlu saya ingatkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen PSP dan juga Dirut PT Pupuk Indonesia dan Ketua Himbara beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 27 Januari, iya keputusan rapat meminta Pemerintah melakukan kajian mengenai penerapan penyaluran pupuk bersubsidi melalui Bumdes. Untuk selanjutnya kita minta dipaparkan, disampaikan pada Rapat Kerja ini. Kami mohon nanti pada sesi pendalaman

ada pemaparan yang komprehensif mengenai masalah ini, terima kasih Pak Mindo. Selanjutnya kami persilakan Pak Firman Subagyo.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Pertama-tama tentunya saya berikan apresiasi kepada Pak Menteri yang telah menyampaikan paparannya dan saya tidak mengulang pertanyaan teman-teman yang sudah disampaikan dan tentunya Komisi IV tidak mau kalah semangatnya dengan Pak Menteri. Kalau Pak Menteri tadi semangatnya adalah untuk swasembada pangan dan menuju kedaulatan pangan, tentunya Komisi IV harus mendukung. Tentunya Pak Menteri untuk mencapai kearah sana memang tidak semudah membalik tangan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini Pak Menteri banyak hal-hal yang tentunya perlu kami sampaikan untuk mengadakan sebuah evaluasi dan koreksi. Saya tidak menyalahkan terhadap kepemimpinan yang lalu, mungkin itu sebuah kesalahan tetapi kita tidak mencari kesalahan tetapi kita sekarang bersama-sama untuk memperbaiki.

Pertama Pak Menteri kalau kita bicara tentang masalah pertanian tadi Pak Sudin menyampaikan bahwa tidak ada gunanya kita memberikan ... tidak ada gunanya kita kasih...yang bagus kalau infrastruktur tidak dibangun dengan baik. Pertama mengenai masalah pupuk Pak. Pupuk ini tadi tujuannya subsidi untuk namanya petani-petani miskin tetapi posisi petani kita ini adalah banyak petani yang sifatnya sebagai buruh dan penyewa lahan. Kaitannya dengan masalah petani kita ini Pak yaitu penggunaan kartu tani. Kartu tani ini betul-betul Pak menyulitkan. Saya tahu persis siapa sih konseptornya.

Waktu ada HIMBARA, saya tanya tapi ga mau jawab karena mungkin dia merasa bersalah. Inikan konsepnya para bankir-bankir bank pemerintah dimana mereka melihat bahwa ada uang yang jumlahnya cukup signifikan belasan trilliun yang selama ini mereka menginginkan bahwa uang itu harus putar-putar di bank pemerintah sehingga mekanisme yang dibuat adalah agar dikeluarkan kartu tani yang hanya menggunakan bank Himpunan Bank Milik Negara. Tetapi faktanya Pak, petani kita ini bukan seperti warga masyarakat disekitar Jabodetabek, ada yang digunung-gunung yang usianya sudah diatas 50 tahun. Kalau 50 tahun Pak di Jakarta masih gagah Pak tetapi kalau 50 tahun didesa itu Pak sudah boleh dibilang susah jalannya kadang-kadang susah. Nah posisi ini yang menyulitkan petani apalagi menggunakan sistem PIN. Mereka itu sewa tanah setiap tahun mungkin hari ini menyewa tanah si A, besok tahun depan nyewa tanahnya si B, kartu taninya berubah-ubah.

Persyaratan administrasinya harus bisa menunjukkan pembayaran PBB dan sebagainya, ini juga salah satu persoalan.

Dan kemudian yang menyulitkan lagi adalah harus ada deposit 50.000 persatu tani. 50.000 Pak Menteri untuk orang yang ditingkat desa itu uang 50.000 sangat berharga. Oleh karena itu, jangan dilihat bahwa 50,000 kalau di Jakarta mungkin bankir-bankir duduk saja makan 4 orang 5 juta, tetapi disana 50.000 sangat berharga.

Nah oleh karena itu mohon Pak Menteri betul-betul memperhatikan ini kalau Pak Menteri berani atau mampu menghentikan sementara dan sambil mengevaluasi ini bapak akan diberikan apresiasi seluruh petani se-Indonesia, saya yakin itu karena saya di Komisi IV dengan Pak Mindo sudah ini cukup lama Pak dan kami sudah menyampaikan berkali-kali namun tidak pernah ada yang berani untuk memberikan masukan kepada Pak Presiden terutama yang punya konsep ini konon katanya.

Nah kedua pak mengenai masalah pupuk ini mohon juga diperhatikan Pak karena lahan kita ini pak posisi unsur hara tanah kita ini rata-rata sudah dibawah 50 % bagaimana mau produktif kalau lahan kita yang unsur hara tanah/unsur organik tanah itu masih dibawah 5 % itu mustahil, satu hektar bisa mencapai diatas 5 ton. Saya sepakat dengan Pak Mindo tadi bahwa mutu pupuk organik itu memang harus ditingkatkan. Nah sekarang ini pak pupuk yang beredar dilapangan, pupuk organik itu kualitasnya masih banyak yang belum seperti diharapkan apalagi mekanisme sistem penebusan pupuk ini pak menggunakan sistem paket. Jadi ada pemaksaan harus menebus pupuk organik produk-produk tertentu yang kemudian diaplikasikan itu tidak bisa membantu terhadap produktivitas. Oleh karena itu Pupuk organik ini harus menjadi perhatian betul karena pupuk organik ini diharapkan kedepan alokasi anggarannya pun kalau bisa juga harus ditingkatkan dan kemudian urea mulai dikurangi dan produktivitas akan meningkat.

Nah yang kedua pak mengenai masalah alih fungsi lahan, ini sudah bertahun-tahun kami sampaikan kita punya Undang-undang Nomor 41 perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Namun sampai sekarang banyak kepala daerah yang melakukan fungsi alih lahan dan tidak ada sanksi hukum apapun, padahal sudah jelas di Undang-undang itu ada sanksinya. Nah kalau sekarang Kementerian Pertanian melakukan program penyertaan lahan dan kemudian lahannya existing dialih fungsikan dibiarkan, iya tidak ada gunanya. Ini kejar-kejaran Pak, padahal belum tentu lahannya ... itu jauh lebih baik dari pada lahan yang sudah existing. Ini mohon bapak bisa kerja sama dengan aparat penegak hukum agar alih fungsi lahan ini betul-betul menjadi salah satu prioritas dalam program pertanian kedepan.

Kemudian pak ketiga adalah...tadi Pak Mindo tadi sudah sampaikan. Sampai sekarang pak ini masih banyak yang PPL belum jelas nasibnya. Saya kira ini juga mendapat perhatian, mereka itu juga manusia biasa yang sudah mengabdikan sekian lama berpuluh-puluh tahun dan kemudian kemarin ketika kami juga membahas Undang-undang ASN yang nyaris tidak selesai sampai

hari ini, itu menimbulkan ketidakpastian daripada nasib PPL walaupun pertanian itu sudah paling maju diantara kementerian lain karena nasib PPL itu sudah mayoritas sudah direkrut sebagai ASN, namun masih ada sebagian yang belum terselesaikan. Ini mohon supaya bisa diperhatikan karena nanti PPL itu masih dibutuhkan.

Kemudian Pak Menteri yang terkait dengan tindakan preventif bapak cukup bagus mengenai Virus Corona. Kami harus dukung sikap-sikap Pak Menteri tadi dimana masalah kebutuhan masyarakat kita terus terang masih banyak tergantung pada produk Cina dan sekarang ini Virus Corona bagi kami ini sebetulnya bangsa Indonesia sebagai tantangan tetapi juga peluang. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengatasi kebutuhan pangan nasional yang sekarang ini makin lama makin meningkat terutama bawang putih yang kita masih sangat bergantung dari produk-produk impor dari Cina dan kemudian buah-buahan juga masih banyak yang dari Cina.

Namun dengan adanya Virus Corona ini Pak, kiranya dipacu agar masyarakat sadar pentingnya mereka juga mulai melakukan budidaya. Oleh karena itu Litbang tidak kalah pentingnya untuk memulai, mencari alokasi-alokasi yang mungkin bisa dipakai untuk budidaya bawang putih. Saya rasa ini harus dimulai kesana, ini untuk mendukung rencana kerja Pak Menteri tadi. Memang hari ini pak, kita masih dikecohkan dengan para pedagang karena kita memang menganut sistem pasar bebas ini persoalannya. Jadi apapun komoditi-komoditi itu kami sangat sulit bersaing dengan produk-produk dari Cina yang memang mereka sudah melokalkan program-program pertanian yang sangat efektif dan efisien karena menggunakan mekanisasi dan lain sebagainya.

Dan yang paling akhir pak mengenai masalah isu yang mungkin ini tidak menarik pak tetapi saya berkali-kali mulai dari menteri yang sebelumnya pak, sebetulnya bapak inikan di Pertanian inikan penggali devisa terbesar pak terutama tadi sawit pernah pada posisi menduduki diatas devisa negara penerimaan dari minyak, gas dan bumi. Namun sampai sekarang ini sawit ini dikebukin kanan kiri tapi kita tidak punya regulasi yang jelas.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap komoditi-komoditi strategis termasuk pak yang ini kontroversi pak adalah tembakau itu memiliki kontribusi yang cukup besar dari cukai dan tembakau ini sampai 150 triliun dan tembakau ini juga menghidupi rakyat Indonesia yang mencari pekerjaan, ibu-ibu yang sudah 30 tahun sebagai pelinting rokok namun nyaris dari pemerintah sebelum-sebelumnya kalau diajak bicara tentang tembakau dan sawit ini sangat ketakutan lari dari situ dan bahkan mohon maaf Pak Menteri sebelumnya pada waktu kami undang di Baleg kita ajak membahas Rancangan Undang-undang perkelapa sawitan kemudian ada Pak Menko dan Pak Menteri Perdagangan Perindustrian, Pak Menteri Pertanian lari duluan. Inikan persoalan serius kenapa? Ada apa? Persoalan yang sangat serius seperti ini bahkan sawit itu pernah memberikan kontribusi sampai 500 triliun kalau tidak salah.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Firman mohon waktu, iya hampir 10 menit pak.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Jadi Pak Menteri ini saya rasa poin-poin penting yang kami sampaikan. Yang paling akhir pak mohon diperhatikan serapan Bulog Pak, kasihan Bulog ini gudangnya sudah penuh kalau ini nanti panen tidak bisa diserap oleh Bulog ini jadi korban adalah petani lagi pak. Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Firman mohon maaf tadi saya ingatkan. Saya masih beri toleransi yang cukup baik dua kali lipat waktu yang ditentukan oleh Tatib. Kita persilakan karena kita tahu ini anggotakan jarang-jarang bisa berdialog dengan Pak Menteri, jadi kalau saya berikan kelonggaran sedikit. Tapi mohon kawan-kawan ini masih ada hampir 15,20 tanggapan lagi. Kita beri kesempatan kepada teman-teman semua semoga bisa lebih komprehensif, bisa lebih langsung to the point saja, terima kasih. Selanjutnya Pak Andi Pasluddin.

F-PKS (ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta dengan jajaran,
Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Pertama saya tidak bertanya pak karena sudah kita habiskan pertanyaan dengan Eselon I sudah cukup dalam dan panjang sehingga saya hanya memberikan masukan-masukan kepada Pak Menteri. Yang pertama tentu saya memberikan apresiasi karena soft launching AWR ini sudah dilakukan pak ya dan kita berharap bahwa data yang akan disajikan itu betul-betul data yang sangat lengkap nantinya. Sekarang sudah ada data luas lahan bahan baku dan pertanaman, data produksi dan kita berharap soalnya Pak Menteri ada juga neraca komoditi pak, itu yang paling penting sebenarnya berapa produksi kita? berapa konsumsi kita begitu? sehingga dari Kementerian Perdagangan yang punya hak untuk impor ini tidak ada alasan pak untuk melakukan impor karena produksi kita cukup begitu.

Ini saya kira publik tahu, masyarakat tahu, sehingga dukungan publik kepada pertanian betul-betul sangat kuat begitu, itu yang pertama Pak Menteri cuman kalau di paparan Raker ini pak, ada sedikit yang saya tidak bertanya cuman disini 24 komoditi tidak ada data produksi bawang putih, ini tidak ada Pak Dirjen. 24 disini tidak ada pak, dibahan Raker ini mungkin kelupaan. Ini perlu karena setiap tahun kita menggelontarkan APBN cukup besar untuk bawang putih ditambah lagi 5 % kewajiban daripada importir untuk bawang putih pak. Ini tidak ada pak 24 komoditi yang ada disini, tidak ada bawang putih mungkin itu kelupaan, itu yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri, saya kira KUR dan GRATIK atau Gerakan Ekspor Tiga Kali Lipat ini sudah cukup gemanya pak dan sudah dipahami oleh publik tapi saya ingin juga pak bahwa upaya atau rotemap untuk swasembada komoditi Pak. Ini saya lihat didalam program kerja juga belum terlalu dalam ini misalnya komoditi padi seperti yang Pak Johan katakan tadi 59 itu bukan beras tapi gabah, equivalen dengan 34 mungkin juta ton beras Pak ya. Mungkin kita ingin dengarkan pak tahun 2020, 2021 berapa? dan kira-kira dalam jangka menengah itu 2024 nanti berapa target yang kita inginkan begitu pak, sehingga keberhasilan Kementerian Pertanian. Begitu dengan komoditi jagung misalnya, ini sudah ada datanya 4 tahun kedepan, 5 tahun kedepan berapa yang akan kita capai pak? Sehingga target itu berdasarkan target kuantitas iya pak ya? jadi sekali lagi KUR dan GRATIK ini kita dukung, tapi kita ingin juga keyakinan bahwa kita bisa produksi karena Kementerian Pertanian tugasnya adalah produksi, iya tugas utamanya. Jadi itu yang paling yang saya ingatkan.

Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir karena saya tidak panjang mengenai masalah kita lihat program kerja di Kementerian Pertanian iya pak di semua dirjen banyak memang tugas pembantuan ataupun pengadaan itu diprovinsi dan kabupaten. Ini saya mau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ingin bantuan itu betul-betul yang dibutuhkan oleh petani kita begitu atau masyarakat kita, bukan berdasarkan yang diinginkan oleh korporasi. Nah ini beberapa kementerian lain pak banyak bantuan-bantuan itu ditolak oleh petani kita. Nah oleh karena itu saya berharap juga irjen ini betul-betul mengawasi pak, mengawasi dari hulu kehilir barang-barang ini karena kita tahu ini uang rakyat, kita harus pastikan bahwa satu rupiah pun betul-betul bermanfaat bagi rakyat kita.

Saya kira begitu Pak Menteri, saya tidak hanya memberikan saran-saran, dan hanya catatan-catatan. Mudah-mudahan *insya Allah* apa yang menjadi komitmen dan kebersamaan kita dari RDP dan Raker ini bisa menjadi pegangan kita bagi kedepannya, demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Andi Akmal.

Berikutnya Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran.

Saya langsung saja pak, apa yang akan saya sampaikan adalah aspirasi dari hasil kunjungan dapil dan juga reses. Yang pertama saya mendukung apa yang tadi disampaikan Pak Mindo agar penyuluh THL yang menurut Pak Sekjen 11.000 itu segera dikukuhkan pak untuk mendukung program pertanian tahun 2020.

Permasalahan saya ingin menekankan bahwa disisi lain bahwa persoalan-persoalan yang muncul terkait kartu petani, terkait masalah pupuk bersubsidi, mungkin juga AWR adalah kata kuncinya ada di penyuluh pak. Sangat naif manakala penyuluh tidak memahami anggota kelompoknya, tidak memahami sebaran, lahannya itu, tidak memahami mana terganti pergeseran penggunaan lahan itu karena kalau itu tidak dilakukan secara up to date AWR pun akan gagal kedepan.

Jadi sarannya adalah para penyuluh ini ... diangkat, diberikan pembengkakan, diberikan pelatihan, dan diberikan tanggung jawab termasuk pelaporannya, pelaporan kelompoknya, pelaporan anggotanya sehingga datanya itu bisa up to date nantinya, kalau tidak diberikan tanggung jawab itu tidak akan up to date, akan tumpang tindih kembali.

Kemudian di Dirjen PSP itu ada anggaran fasilitasi guru. Saya kemarin ke dapil memfasilitasi masyarakat untuk meminta KUR karena masih mendapatkan kesulitan. Pertanyaan saya aplikasi program ini seperti apa? apakah yang seperti saya jalani mengantar masyarakat, mendapatkan KUR, memfasilitasi apa yang diperlukan, seperti apa? Atau mungkin ini adalah salah satu bagian yang perlu dilakukan sosialisasi pada saat kami juga berkunjung kedapil begitu.

Kemudian terkait dengan bidang Dirjen Perkebunan, ini ada benih tebu 8.175.000 dengan anggaran 13 miliar lebih. Hasil kunjungan dapil reses pak informasi pejabat pengelola pabrik itu bahwa di Pulau Jawa ini sudah tidak bisa berkembang pabrik-pabrik gula itu. Di Jawa Timur apalagi sewa tanah sudah 30 juta perhektar dan itu hanya mengandalkan tebu rakyat. Yang masih peluang di Jawa Barat satu-satunya di Majalengka tempat dapil saya pak. Ada persoalan lagi karena oleh LSM dipermasalahkan tanah-tanahnya.

Nah oleh karena itu, jadi kita Komisi IV khawatir ini pak produksi gula tahun 2019 menurun, kondisi-kondisi pabrik-pabrik gula kita seperti itu. Nah khawatir nanti pada saat lebaran terjadi seperti Pak Ketua ini pada saat

implek buahnya tidak ada. Kalau sampai juga gulanya tidak ada membahayakan, keributan akan terjadi. Pertanyaan saya sudah dikeluarkan RIPH-nya tidak pak untuk mensupport keseimbangan gula keperluan lebaran nanti?

Kemudian Dirjen Hortikultura, bawang merah dan bawang putih. Di Majalengka dapil saya Pak orang Brebes pun juga nanam bawangnya di Majalengka karena punya angin pak, makannya kalau malam itu lampunya gebyar disana itu. Rakyat minta bibit sertifikasi pak untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian terkait dengan bawang putih saya membaca target 2021 kan mau mandiri, cuman persoalan dalam program tahun 2020 justru produksi bawang putih ditargetkan menurun dibandingkan dengan tahun 2019. 2019 87.000, 2020 hanya 60.000 bagaimana mungkin bisa mandiri, begitu. Sarannya adalah program ini tentunya perlu didukung dengan aktivitasnya untuk mencapai tujuan itu, jangan kemudian orientasi kita kepada impor-impor terus.

Kemudian Dirjen Tanaman Pangan, porang ini sudah membudaya ini pak, meluas pada seluruh wilayah dan juga tidak akan terganggu karena semuanya pasti akan di ekspor. Mohon ini juga dijadikan prioritas utama dan juga pembagian bibitnya juga merata, jangan melupakan juga dapil saya pak karena juga sedang booming menanam porang. Kemudian yang berikutnya Badan Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan. Saya mohon untuk program pertanian keluarga, program perkarangan pangan lestari, program pertanian masuk sekolah akan lebih baik diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan. Ini akan lebih dirasakan oleh masyarakat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Izin pak bisa dipercepat?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Oke, satu lagi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sudah jam 16.00 WIB harus sholat pak.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terakhir pak, terakhir pak, saya kira belum 3 menit nih.

Program rencana ekspor 3 kali. Ini pun juga iya kalau kita kaji programnya ini tidak mendukung programnya pak sebut saja impor beras 100.000 ton padahal produksi tahun kemarin 54 juta ton gabah, tahun 2020 direncanakan 59 juta kurang lebih 4 juta tambahannya, analokal kalau jadi beras hanya 2,4 juta ton. Gudang-gudang Bulog sekarang sedang dikosongkan pak karena isinya sebagian beras busuk dan sudah turun kualitasnya artinya tambahan untuk produksi saja tidak mengisi untuk

gudang-gudangnya Bulog bagaimana bisa ekspor dengan posisi seperti itu. Saya hanya mengingatkan tolong programnya juga terkoneksi dengan rencana begitu. Saya kira itu pak terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Kita santai dulu nih, ini tegang banget.

Yang pertama tadi ada kepercayaan kepada pimpinan dan perwakilan dari kapoksi untuk menyepakati hal-hal yang dianggap strategis secara bersama sehingga tidak lagi ada pandangan yang begitu panjang yang melelahkan kita semua. Jadi kalau kata lagu Rhoma Irama “kau yang mewakili dan kau yang mengakhiri”.

Jadi untuk itu saya harap inikan daftaran panjang banget bisa sampai malam. Iya buat apa tadi menugaskan pimpinan untuk membangun komitmen dan kesepakatan bahwa ini cepat penyelesaiannya, itu loh. Ini kan tadi sudah menugaskan pada kita, nanti kalau ditugasin lagi terus panjang lagi iya buat apa bikin pertemuan bahwa hal-hal yang dianggap strategis yang itu kewenangannya kementerian kita serahkan.

Secara prinsip yang penting para Anggota Dewan itu bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sama dengan baik untuk wilayahnya agar wilayahnya meningkat produksi pertaniannya. Bagaimana kalau ini saja disepakati, ini kalau diterusin lagi bisa sampai malam, terima kasih.

F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Pimpinan Ketua, Ketua Pak Dedi. Pak Dedi instruksi sebentar pak.

Saya sangat setuju pak bahwa:

1. Tadi sudah dilakukan Rapat Pimpinan dan kapoksi.
2. Raker tanggal kemarin hari rabu dan hari kamis itu sudah 6 jam dan 6 jam, jadi 12 jam.

Jadi maksud saya terlalu panjang dan kita ini dengan Pak Menteri ini bukan yang terakhir dan yang pertama ini, masih ada konteks pengawasan. Saya mengusulkan saja pak ini, kalau mau dipercepat silakan mekanismenya seperti apa nanti dalam konteks pengawasan bisa kita lakukan bersama-sama. Kalau mau satu persatu bisa mungkin jam 12 malam selesainya, terima kasih Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik Pak.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Fakhry silakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya kira sependapat itu Pak Fauzi sama Pimpinan, cuma kan kita juga ingin memberikan masukan dengan Menteri juga cuman tinggal mekanisme saja kita atur, tidak usah berbelit-belit. Ini saja Pak Ketua cuman kalau di cut saja untuk apa guna Raker juga Pak Ketua.

F-GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Intrupsi Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik untuk apa? Iya untuk ketemu, santai saja iyakan? Intinya apa yang bapak inginkan tercapai Pak Menteri kedapil. Selesai pak sudah jawab kesaya oke untuk Pak Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Silakan, pakai mix pak.

F-PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):

Sudah ada kesepakatan kita dengan kementerian. Saya kira sesuai dengan rapat kita tadi, saya kira ini cukup baik tapi ada saya sedikit memberikan saran ke Pak Menteri bahwa di Riau itu lain daerah lain kualitasnya pak, karena di Riau ini contohnya alat-alat...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak sebentar dulu, ini bapak kok pertanyaan lagi. Sudah begini deh, saya tawarin nih, inikan demokrasi disepakati bersama, ini pertanyaan masih banyak kita sampaikan pertanyaan tertulis dan dijawab tertulis...yang penting apa yang kita inginkan bisa diakomodir secara bersama-sama dan kepentingan masyarakat terealisasi. Kalau ada dusta berarti nanti Rakernya itu bisa 7 hari 7 malam ganti, setuju?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebentar, sebentar.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sudah selesai.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saudara Ketua, Anggota DPR disini tidak hanya berpikir dapilnya jangan seperti itu. Yang penting bawa kedapil jadi Anggota DPRD saja. Kita disini tidak boleh hanya bicara dapil, kita bicara wakil rakyat Indonesia. Jadi kalau kita bicara, bicara juga yang lain-lain, komprehensif berpikirnya. Jadi walaupun lama disini, itu dalam rangka untuk sepenuhnya membantu pikiran-pikiran begitu loh, didengar oleh banyak orang, pikiran-pikiran itu bukan dalam rangka mengganjal, itu jauh dari pikiran iya? Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik dapil hanya bagian dari mekanisme keterwakilan, tetapi sesungguhnya setiap orang ini menyampaikan hampir seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada secara komprehensif dapil bicara padi bicara Indonesia, bicara bawang putih bicara Indonesia, bicara bawang merah bicara Indonesia. Nah untuk itu saya pikir sudah disepakati tinggal hanya satu saja ini temuan yang kemarin ke Pak Menteri yang di Karawang ada gudang yang ditemukan, apa hukuman yang akan diberikan oleh Kementerian Pertanian terhadap para eksportir yang nakal disaat orang butuh, masih menimbun bawang putih? terima kasih.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H, M.H.):

Ketua dan Para Anggota DPR Komisi IV yang saya muliakan.

Saya mencatat dengan serius semua yang telah disampaikan dan biasanya sepulang dari rapat, saya bersama dengan Eselon I saya mengkajinya kembali insya allah. Tetapi tentu saja yang lebih komprehensif lagi kalau pertanyaan tadi terutama yang berkaitan dengan titipan dapil secara khusus dibuatkan tertulis kepada saya. Dengan demikian *insya allah* saya akan jawab bahkan mungkin mendahului itu

Pada dasarnya Pak Ketua dan Para Anggota DPR Komisi IV ada yang berkait catatan saya tentang bagaimana menanam, apa-apa yang bersoal dengan bagaimana menanam itu. Ada persoalan dengan budidaya termasuk dengan cuaca saya mencatat NTB, NTT seperti itu. Berarti ini ada penyikapan-penyikapan yang harus saya bicarakan dengan Komisi IV dan mungkin juga dengan teman-teman yang ada disini tidak bisa cuman ditempat sini. Kemudian ada yang berkait dengan bagaimana memetikanya agar tepat waktu, tepat sasaran dan tidak terjadi ... yang ada. Ini juga menjadi suatu

pekerjaan tidak ringan karena walaupun kita sudah menanam, mengolahnya tetapi memetikanya tidak siap bahkan mengolahnya tidak siap, akhirnya tidak punya pasar, tidak ada yang beli ini menjadi persoalan-persoalan.

Saya kira kurang lebih itu yang saya tangkap dari forum ini. Bapak hadirin sekalian, oleh karena itu saya coba kaji sebenarnya target-target yang ada yang 7 % itu, target-target yang ada menurunkan ... itu ada dilampiran-lampiran yang mungkin belum sepenuhnya kita dapat. Ada disini kecuali memang bawang putih tidak tercantum karena bawang putih itu dari kajian yang ada memang adalah tanaman subtropis. Kita umumnya daerah negara tropis tidak banyak daerah yang bisa sepenuhnya bawang putih tetapi bawang merah menjadi andalan kita. Jadi kurang lebih itulah tetapi kalau ini masih mau dicantumkan juga tidak mengapa, tetapi tentu saja bukan andalan utama dari kita karena ternyata ini tidak semudah yang kita perkirakan.

Ada masalah-masalah riset, ada masalah-masalah Litbang yang harus dilakukan dan ini memang menjadi penting. Prinsip KUR itu sepenuhnya adalah sebenarnya kalau kita mau mencapai optimalisasi pertanian yang maksimal intervensi permodalannya juga harus dipikirkan dan salah satunya yang tersedia oleh pemerintah adalah KUR dan ini dengan segala upaya kita mencoba mengambil sebuah tanggung jawab terhadap KUR itu 50 triliun pak. Mekanisme dan sistemnya tetap KUR biasa tetapi ini yang coba kami bagikan kepada dirjen-dirjen untuk menjadi bagian orientasi memperkuat apa yang ada di KUR yang ada karena kita juga membutuhkan itu. Dengan uang 21 triliun saja di Kementerian Pertanian untuk memutar kurang lebih hampir 2.000 triliun tentu tidak logic dalam sistematika berpikir kita. Dia membutuhkan intervensi minimal 50-200 triliun bahkan baru bisa menghasilkan sekian banyak. Oleh karena itu KUR menjadi bagian-bagian strategi yang kita rebut dari...ada.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Izin Pak Ketua, Pak Menteri menceritakan KUR itu agak sulit diaplikasikan di masyarakat karena selalu menganut bank capble pak 5 c.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Itulah yang kami jawab dengan cara mengambil target dan kemudian melakukan fasilitasi langsung. Kalau ada masalah yang kita targetkan melalui KUR termasuk didapilnya bapak-bapak yang sudah difasilitasi dan bersoal dengan masalah bank capble disitu kalau dia masuk diprogram kita, maka itu bisa dijembatani, kita coba seperti itu. Kemudian yang terakhir.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN S.E.):

Pak Menteri sebentar.

Menyambung ya dari Ibu Endang, sangat penting pak kalau bisa fasilitasnya konkrit dalam bentuk kebijakan sehingga baik pemerintah pusat,

provinsi maupun kabupaten kota dalam APBN, APBD punya cadangan untuk menjadi *avalist* sehingga kalau ada resiko, ada jaminan dari APBN. Nah kalau tidak begitu, tidak akan jalan pak, percaya sama saya. Itu harus didorong persoalan nanti anggaran itu terpakai atau tidak tetapi ada *back up* dari pemerintah begitu ya, terima kasih.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Jadi KUR itu seperti apa yang kita rencanakan harus terfasilitasi dengan tanggung jawab institusi/ garansi institusi melalui bupati yang bertanda tangan, gubernur tanda tangan dan Menteri Pertanian tanda tangan untuk memacu program yang ada. Kurang lebih seperti itu.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua.

Intrupsi Pak Ketua.

Saya tadi sedikit saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Iya silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri, saya tadi sengaja memang mengangkat KUR ini karena kami menganggap KUR ini adalah ibarat pisau bermata dua bagi petani. Dia bisa meringankan pekerjaan petani karena dibantu dengan modal tetapi kalau petani itu tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan lebih untuk mengembalikan dananya ini, dia bisa menjadi beban bagi petani, nah ini yang harus kita cermati. Kami bersyukur Pak Menteri sudah menyiapkan ini, tapi kami ingin supaya ini ada keringanan-keringanan tetapi ada *certainty*-nya, adanya kepastiannya bagi petani dia tidak menjadi beban, begitu Pak Ketua.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Tentu kalau program kita memang lakukan konsentrasi program terutama ekosistem bisnis pertaniannya memang jalan ditingkat kecamatan dan difasilitasi dengan KUR didepannya, difasilitasi KUR dengan pengolahannya dan lain-lain hasilnya tentu sudah bisa dalam hitungan-hitungan yang ada, kita coba dulu pak. Sebenarnya tanpa dicantumkan ini program, program ini jalan oleh pemerintah pak.

Jadi barang ini jalan cuman kita coba mengklaim lebih serius agar ada konsepsi yang lebih pasti terhadap modal awal petani kita, sehingga mereka

bisa hitung lebih kuat terhadap apa yang ada. Memang ini bukan tidak mudah begitu pak, tidak mudah tetapi yang kita lebih banyak memfasilitasi, lebih banyak kepada bagaimana agar *bankcapble* karena selalu teknis perbankan yang menyusahkan mereka, ini kami terobos dengan mencoba mengambil alih bahwa kami punya target seperti ini dan ada MOU dengan beberapa perbankan yang melakukan KUR itu agar teknis-teknis pembinaan dan sementara ini lagi jalan dilapangan pak.

Kami berharap mungkin saja ini tidak sempurna tetapi kita coba dulu dan turun bersama-sama dengan Komisi IV terutama didapilnya mana. Oleh karena itu pak saya berharap teman-teman yang ada di Komisi Anggota DPR Komisi IV sebutkan saja dimana desanya pak, kecamatannya dan kita bicara disekitar situ KUR-nya seperti apa dan itu di AWR kami langsung potensi itu kelihatan begitu. Dari disebutkan desa, kecamatannya, kabupaten kami sudah bisa langsung lihat potensi ini ada apa disitu termasuk bagaimana potensi-potensi lahan yang ada disitu, seperti apa ketersediaan yang ada dan itulah fasilitasi IT yang ada yang memang sudah memberikan analisa-analisa argo klimaks dan lain-lain yang kita miliki.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Mau kasih masukan Pak Ketua ke Pak Menteri soal KUR ini.

Jadi boleh ya? 2 menit saja.

Dalam pengamatan dan pengalaman saya beberapa tahun, itu KUR itu yang jalan selama ini dipetani kepetani penjual jadi pedagang, dipasar jalan dia. Jadi KUR ini bukan sekedar hanya *bankcapble*. KUR itu diberikan oleh perbankan kepada yang *visible* tetapi belum *bankcapble* begitulah tetapi *visible* belum *bankcapble* karena makannya dia tidak pakai anggaran, yang direncanakan nanti oleh perbankan Bank Indonesia menjadi 50 juta.

KUR itu bukan dari Kementerian Pertanian, Kementerian itu dari perbankan. Nah visibelnya itu bagaimana? Jadi kalau hanya tanam jagung kecil kemungkinannya diyakini sebagai *visibel*, iya kalau berhasil, iya kalau harganya tidak turun kan begitu. Jadi kalau hanya satu sektor saja seperti itu, itu tingkat kegagalan dan tingkat cairnya itu akan lebih kecil. Kalau tadi disatukan, dikaitkan ada ovtekernya, ovtekernya apakah industri? ovtekernya apakah itu pedagang? Misalnya mengkaitkan dengan PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) di joint kan disatu cluster seperti yang saya katakan tadi silakan Anggota Dewan ini mengajukan untuk-untuk cluster itu, dengan seperti itu yang visibel yang tidak *bankcapble* itu bisa diberikan karena dilihat *visible* petani hanya nanam, sudah ada ovtekernya, sudah ada bantuan UBJA misalnya kepada Bumdes, kira-kira begitu saran saya Pak Menteri. Jangan tunggal.

Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Pak Mindo yang kami cobakan itu seperti itu pak. Jadi seperti itu, kasih saya kesempatan mencobanya dilapangan tentunya tidak semudah. Begini tanpa kami cantumkan program ini program ada, 184 triliun dari Pemerintah silakan ambil KUR disana. Kami me coba untuk menariknya 50 triliun untuk lebih konsentrasi sehingga selama ini yang dipakai oleh pertanian itu tidak lebih dari 20 triliun pak jadi seperti itu.

Oleh karena itu ada kesempatan kita mengintervensi kepada sebuah sistem dimana ovteker maupun penanaman bisa saling terkait dalam satu pendekatan yang ada dan itulah kenapa kami konsentrasinya ada dikecamatan kurang lebih seperti itu.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Nah berkaitan dengan itu Pak Menteri, pengalaman yang lalu ada satu merk dagang jagung kalau tidak salah 80% lebih loh ya, tapi tidak ada keterkaitannya dia sebagai ovteker padahal saya tahu jenis itu punya rangkaian usaha termasuk yang sangat membutuhkan jagung ini. Jadi kalau itu ditenderkan saja siapa yang berani ovtekernya? iya soal kualitas beda-beda setengah ton, lupakan itu. Tetapi kepastian ovteker itu lebih utama menyelamatkan petani, bukan menyelamatkan hasil produksinya tukang benih, pembenih tidak lah. Bukan tugas seperti itu yang harus kita kerjakan sama-sama disini menggunakan uang rakyat ini, lebih memastikan.

Jadi tolong dengan sangat itu Pak Menteri lewat dirjen, mohon itu diperhatikan. Semua itu adalah investor-investor di Indonesia, kita harus threat dengan sama. Mana yang lebih menguntungkan republik, itu yang kita utamakan, siapa itu urusan bapak-bapak bukan urusan legislatif, terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua sedikit Pak Ketua.

Pak Menteri terkait dengan KUR ini, saya memang lebih fokus bagaimana KUR ini disalurkan betul-betul pada tepat sasaran dan tepat guna. Karena kami mengkhawatirkan bahwa didalam bisnis pertanian ini itukan banyak juga disitu intermediasinya yang terutama terkait dengan persoalan pelaku-pelaku yang melakukan ijon terhadap petani dan biasanya inilah yang sebenarnya yang mendapatkan pandai memanfaatkan peluang ini, sementara petaninya ini adalah tidak kita perhatikan dengan cara yang baik. Oleh karena itulah maka saya minta supaya ada *skim* yang jelas dan memang harus tepat sasaran ini supaya petani kita ini, saya terima kasih sekali Pak Menteri bahwa bisa memperjuangkan 51 triliun itu. Ini kaitannya adalah kita untuk mengentaskan kemiskinan disektor pertanian begitu Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik silakan Pak Menteri diteruskan dan tidak dulu ada yang menyela diselesaikan sampai tuntas, kemudian nanti kita simpulkan. Setuju ga? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, saya intrupsi Pimpinan.

Saya intrupsi.

Selama saya 10 tahun menjadi Anggota Komisi IV tidak dan belum pernah ada pertanyaan itu tertulis. Yang ada jawaban tertulis karena kalau tidak itu berate tidak ada pendalaman. Jadi Pak Pimpinan sudah mengetok palu silakan lanjutkan, saya tidak ikutan, terima kasih.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Intrupsi Pimpinan.

Sebelah kiri Kang Dedi.

Terima kasih.

Saya pada saat ada keputusan dari Pimpinan, saya lagi diluar. Jadi mohon maaf saya pun bingung pada saat hadir disini tiba-tiba Pak Menteri sudah menjawab padahal saya sendiri punya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan termasuk dengan dapil saya. Nah jadi saya mohon kebiasaan yang terjadi di Komisi IV iya tetap kita hormati, semuanya harus ngomong. Kalau memang tidak ada yang ngomong dan cukup tertulis, silakan diserahkan ke masing pribadi kepribadi saja bukan diambil keputusan dalam rapat.

Jadi saya mohon sekali lagi tetap saja, iya kan kita bisa ini menyampaikan pertanyaan secara langsung dan dijawab setelah pertanyaan itu selesai semua, terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik silakan.

F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Kita paham pak maksudnya kawan-kawan itu, tadi disepakati oleh Kang Dedy itu cara yang efektif pak. Nah, cara yang efektif itu kalau mau perangnya tidak ada masalah perangnya, kita kali 54 anggota kali 3 menit

seperti itu. Yang kedua bisa saja kawan-kawan misalnya di Komisi III itu perfraksi pak. Nggak Komisi III itu perfraksi, saya mencontohkan kemarin saya lihat baca youtube, baca Permen itu perfraksi, tinggal bagaimana mekanismenya saja, begitu Pak Ono. Nah saya hanya ini pak yang pertama.

Itu yang kedua hanya menggariskan masalah KUR Pak Hermanto. KUR ini bukan semata-mata program Kementerian Pertanian pak. KUR ini adalah program BUMN atau bank-bank plat merah. Nah persyaratan kita hanya menstimulus kelompok tani dan Gabok Tan supaya ikut aturan yang dikeluarkan oleh bank bukan Kementerian Pertanian yang mengeluarkan regulasi orang yang mendapatkan KUR dan tidak mendapatkan KUR dan terima kasih kepada Pak Amran dari total anggaran KUR yang ada itu, 50 triliun bisa dimasukkan kedalam. Eh Pak Sahrul lupa lagi saya pak, mohon maaf, mohon maaf pak, mohon maaf.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sudah pak?

F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Iya itu saja seperti itu, jadi menggaris bawah itu Pak Syahrul kira-kira.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pimpinan, tadi merespon saya pikir kita bahas dulu ini terkait dengan mekanisme rapat kita. Kalau usulan Fauzi itu bahwa perfraksi sesuai dengan yang dilakukan Komisi lain kita bahas diinternal seharusnya tidak sekarang. Harus disetujui kan terkait dengan pimpinan dan kapoksi misalnya, kalau itu dianggap lebih efektif. Jadi kalau sekarang iya diserahkan saja dan saya secara pribadi dan mewakili fraksi ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan.

Jadi saya mohon izin kalau pun yang lainnya tidak mau menyampaikan silakan, tetapi saya sekarang mohon izin untuk menyampaikan, terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Silakan Pak Salim, silakan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Izin ketua konkritnya saja, supaya agak apa kita *break* saja *ashar* sebentar Ketua. Itu jalan yang tengah yang terbaik ketua.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik begini secara prinsip tadikan sudah hampir seluruhnya menyampaikan dan kita juga tadi diberikan tugas waktu awal dan kita sudah melaksanakan tugas itu. Mungkin Pak Ono waktu pagi tidak hadir bahwa kita diberi tugas. Tetapi sebagai bagian akomodasi terhadap keinginan, Pak Ono dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang terakhir, terima kasih.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Setelah dari saya Pak Ichsan Firdaus.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Sebentar, ketua jangan langsung pastikan itu yang terakhir. Kita tidak tahu pikiran mereka-mereka, oke terakhir sampai ashar.

F-NasDem (FAUZI H AMRO, M.Si.):

Izin pimpinan nanti saya lanjut tambahan Pimpinan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Iya terima kasih pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Mohon maaf kalau terganggu dengan, iya intermezzolah pak biasalah pak di kita sangat dinamis apalagi sekarang hampir seluruhnya anggota komisi ini hadir. Pak Menteri tadi saya tertarik dengan bahasa Pak Menteri yang menyampaikan bahwa Pak Menteri mempunyai tanggung jawab yang besar terkait dengan perutnya rakyat Indonesia, juga menyampaikan sudah saatnya jangan berpura-pura jangan bohong.

Nah tentunya saya ingin mendalami itu terkait dengan masalah pupuk pak. Ini tidak tahu ini apakah yang bohong ini pembisiknya Pak Menteri atau seperti apa? Karena terkait dengan pupuk subsidi tadi yang disampaikan Pak Menteri aman-aman saja.

Nah sekarang saya diminta oleh teman-teman di Indramayu, teman-teman petani terkait dengan adanya surat dari Pupuk Petrokimia Gresik yang melakukan penghentian penyaluran pupuk SP36 dan Ponska dan ternyata terjadi pengurangan yang sangat signifikan alokasi untuk Indramayu 2019 sebesar 20.314 ton, tahun 2020 hanya 2.782. Nah sehingga ini berkurang 17.532. Untuk MPK atau Ponska dari 47.512 sekarang tersisa hanya 5.175 berkurang 42.337.

Nah realisasi per 31 Januari untuk SP 36 sudah mencapai 4.905 melebihi dari kuota yang ditetapkan 176,32 %. Nah untuk MPK sudah

teralisasi 9.448, sudah 182,57% dan saya langsung cek tadi Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat ini dasarnya apa dan ternyata berdasarkan SK Mentan.

Nah ini per 31 Januari pak masih panjang Indramayu dengan luas tanam yang mencapai 130.000 hektar dengan produksi gabah potensinya 1, 8 juta ton setiap tahun. Ini pasti akan terjadi gejolak yang keras di kabupaten Indramayu. Nah sehingga mohon ini menjadi perhatian ini tadi bicara pupuk aman, aman yang mana apabila terkait dengan kuota Indramayu yang sangat berkurang signifikan? mohon ini dicarikan solusi Pak Menteri.

Nah yang kedua terkait dengan kita melihat dari struktur APBN di Kementerian Pertanian terutama kegiatan-kegiatan, ini mayoritas terkait dengan pengadaan dan isu yang berkembang yang sampai ketelinga kami bahwa terjadi permainan-permainan dalam pengadaan-pengadaan itu, sudah sistemik yang terjadi. Saya tidak perlu bongkar disini mungkin kegiatan apa saja, permainannya bagaimana tapi mungkin saya bisa suatu saat dengan Pak Irjen ini menjadi catatan kepada Pak Menteri harus masuk kedalam pak, jangan sampai terjadi ada pengkondisian, pola permainan yang kalau DPR ini dengar, KPK, Kejaksaan, Kepolisian juga pasti dengar. Ayolah kita bongkar bareng-bareng dan ini menjadi tugas kami sebagai Anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Nah yang ketiga terkait dengan kostratani dan forum. Saya sih berpikir apa sih kendala kita terkait produksi padi misalnya yang belum maksimal ditargetkan oleh Kementan. Ternyata memang penyuluh dengan berbagai macam kekurangannya, mereka yang belum diangkat menjadi ASN, mereka yang uang sakunya juga masih terbatas itu menjadi salah satu faktor penghambat bagaimana tugas penyuluh juga tidak maksimal, tetapi ada sisi lain apakah petani kita juga sudah diupgrade SDM –nya, sehingga pada saat bicara kostratani forum dengan anggaran yang begitu besar pernah tidak kita berpikir untuk lebih mengalokasikan bagaimana kita meng-upgrade SDM petani dengan melakukan pelatihan-pelatihan? bisa tidak kita mendorong bagaimana fasilitasi sarana prasarana untuk cepat sampai ke petani? Bisa tidak kita berpikir bagaimana kita mendampingi petani pada aspek distribusi? supaya mereka mendapatkan harga produk mereka yang lebih baik. Nah sehingga mohon ini masih tetap menjadi perhatian kita.

Nah terkait dengan holtikultura, pengembangan bawang putih di 2019 kita harus akui bersama inikan kurang berhasil. Tentunya ada beberapa faktor tadi terkait dengan alam misalnya atau bahkan misalnya bibit bawang putih yang tidak sesuai dengan iklim Indonesia tapi di tahun 2020 ini masih di anggarkan ini sebesar 268 miliar, nah sedangkan masih ada juga kebijakan Mentan melalui Permentan yang mewajibkan importir untuk menanam bawang putih dan kita juga beberapa kali kita mengundang sebelum Pak Menteri menjabat, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kewajiban untuk menanam ini juga banyak yang tidak tercapai, tidak terealisasi menanamnya. Nah di sisi lain dengan kondisi di Cina yang sedang terjangkit virus Corona, kita harus yakini bahwa ini akan ada hambatan impor

sementara kebutuhan dalam negeri juga tetap tidak bisa tercukupi, masih tetap mengandalkan impor.

Nah sehingga yang ingin saya tanyakan apa solusi jangka pendek dari Pak Menteri untuk mengatasi harga bawang putih yang saat ini boleh dikatakan kalau pasokannya ini terus kurang, iya tidak akan terkendali. Nah solusi jangka pendeknya apa kira-kira pak? nah jadi mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik terima kasih.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Selanjutnya kita skorsi ashar dulu dong, masa tidak sholat? Ashar dulu, kita lanjutkan nanti pukul 17.00 WIB, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih kita skorsing untuk sholat ashar.

(RAPAT DISKORS)

(RAPAT DIMULAI LAGI PUKUL 17.00 WIB)

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Pertanyaan serius kepada pemerintah negara dalam hal ini adalah Pak Kementan. Kemudian yang terkait dengan penyuluh Pak Menteri, saya setuju dengan pandangan teman-teman yang lain dengan kejelasan status untuk mereka tapi disisi lain saya juga punya beberapa rekomendasi terkait dengan penyuluh ini.

Yang pertama bahwa profesionalisme penyuluh itu suatu kebutuhan yang sangat penting bukan hanya soal bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan mereka dalam bekerja tetapi juga penguasaan teknologi dan informasi. Kita harapkan bahwa BPP salah satunya menjadi rumah bagi petani. Petani itu butuh ditemani, mereka butuh teman untuk bisa berbagai dalam semua situasi suasana bapak. Ketika musim pancaroba, ketika masa tanam, ketika ada gejolak harga dan seterusnya kepada siapa

mereka itu akan bertanya kalau kemudian justru kondisi dan jarak antara penyuluh dan petani ini jauh.

Jarak itu bukan hanya fisik tetapi kehadiran yang mencoba mengerti menyelami emosi dan rasa petani itu yang penting. Nah kita sudah lama ini kehilangan hubungan atau afinitas antara penyuluh dan petani sampai kepada tingkat yang seperti itu sehingga penyuluh itu hanya terjebak kepada kegiatan yang sifatnya administratif dan kita tidak menginginkan itu. Ini juga kritik ini sejenis pendamping-pendamping yang lain yang mana tugas pokok fungsinya itu yang seharusnya ada *empowering* kalau kita adalah petani tetapi justru mereka hanya sibuk bagaimana membuat laporan, bagaimana mereka terjebak diurusan-urusan yang sangat administratif tapi lupa bagaimana memperdayakan mendampingi dari hulu sampai hilir sehingga petani ini bisa maju dan sejahtera. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan ini pak, rencananya bapak terkait dengan program 2020. Ini kan Indonesia pasti dengan iklim tropis yang memang sangat cocok ya untuk pertanian, tetapi disisi lain.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan rapat saya ambil kembali, karena tadi saya ada tamu. Mbak Lulu sudah 3 menit sesuai kesempatan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Sudah 3 menit pak?

KETUA RAPAT:

Sudah 3 menit stop.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Oke gitu ya kalau saya wis ga papa wis.

KETUA RAPAT:

Tidak ini kesepakatan tadi, nanti boleh diperdalam.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Boleh saya terima bapak.

KETUA RAPAT:

Karena tadi ada tamu saya dari luar, makannya tadi saya temuin dulu sebentar.

Selanjutnya Pak Muslim.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri beserta jajarannya.

Saya tidak panjang, tidak mengulang lagi apa yang disampaikan teman-teman. Pertama tentu saya berikan apresiasi dulu Pak Menteri, kenapa? karena hari ini memang Pak Menteri ini menterinya Indonesia pak artinya betul-betul ini kita memahami bahwa yang kita lakukan ini buat kepentingan dari Sabang sampai Merauke Pak Menteri.

Yang kedua berkaitan pupuk Pak Menteri. Ini karena saya waktu kemarin sudah meninjau langsung Pupuk Iskandar Muda pak di Aceh. Kemarin kita sangat terkendala masalah kuota dan *alhamdulillah* hari ini mana Pupuk Iskandar Muda tadi hadir? Ada disini tidak pupuk? iya pak direktur *alhamdulillah* kita kembali lagi kuota subsidi pupuk khusus di Aceh *alhamdulillah* meningkat Pak Menteri artinya sudah kembali, kemarin sangat kurang sekarang dikembalikan terima kasih.

Kemudian yang kedua berkaitan persoalan isu pupuk ini Pak Menteri. Disini saya melihat kendala yang sangat mendasar adalah persoalan data yang khususnya berkaitan dengan RDKK. Dalam konteks ini saya berharap nanti butuh suatu pengawasan yang konkrit dari pihak kementerian dalam hal ini termasuk juga khususnya dari PT Pupuk Indonesia karena saya lihat persoalan data ini yang menjadi hambatan sehingga penyaluran subsidi pupuk ini terhambat akhirnya masyarakat yang menjadi korban, akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari situ. Itu mungkin point yang pertama.

Yang kedua berkaitan dengan.

KETUA RAPAT:

Hanya mengingatkan tinggal satu menit lagi.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Sedikit, satu menit tidak nyampai.

Berkaitan dengan asuransi usaha pertanian padi. Ini tentu spirit dari petani sangat bagus Pak Menteri. Dalam kontek ini kita tahu betul persoalan gagal panen yang menyebabkan petani menderita selama ini salah satu asuransi itu solusi.

Namun demikian saya berharap ini ada dirjen terkait ini berkaitan dengan asuransi usaha tani betul-betul fokus pak, betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat, manfaatkan juga Teman-teman di DPR ini ketika ke dapil

artinya banyak masyarakat yang tidak tahu padahal ini sangat manfaatnya sangat besar. Ini saya harapkan Pak Menteri juga tolong ditugaskan ke dirjen terkait sampai dilevel bawah pak, disosialisasikan bahkan kami siap memback up untuk itu jadi sehingga manfaat dari asuransi petani betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

KETUA RAPAT:

Pak Muslim, sudah 3 menit.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Cukup itu saja dua point, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi kemarin saya juga minta dengan Eselon I perihal masalah sosialisasi asuransi tani karena dikantor dinas pertanian kabupaten kadang tidak ada oknumnya disana. Ini loh masalahnya, maka nanti saya minta para anggota pulang ke dapil sekalian reses buatlah booklet atau buatlah selebaran bagikan kepetani cara membayar asuransi, pertanian, peternakan, cara klaimnya apa itu dibuat juga. Jadi sekalian di sosialisasikan.

Selanjutnya Pak Suhardi Duka, silakan Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua dan wakil ketua serta Anggota Dewan yang terhormat,
Bapak Menteri dan Para Eselon I yang saya hormati.

Saya juga ingin kembali apresiasi Pak Menteri bahwa kita yakini Pak Sahrul adalah menteri untuk Indonesia dan saya juga ingin menyakinkan Pak Menteri bahwa Komisi IV adalah komisi yang akan membantu bapak untuk menyukseskan bapak. Kita tahu bahwa Pak Sahrul dimana pun dia berada selalu sukses, jadi bupati sukses, jadi gubernur sukses dan yakin bahwa jadi menteri juga akan sukses, dalam 5 tahun kedepan, amin.

Persoalan kita saat ini memang di sektor pertanian. Petani kita masih miskin pak, gangguan produksi terhadap hasil-hasil pertanian kita dirasakan banyak gangguannya tidak mulus apalagi ditengah virus Corona banyak impor-impor kita yang akan menjadi persoalan demikian juga terhadap ekspor kita karena dua-duanya pasti terganggu.

Karena waktu yang sangat mendesak maka saya ingin bertanya kepada bapak walaupun Pak Sekjen dan Eselon I bapak sudah menjelaskan

kepada saya tentang kostra tani. Saya perlu penjelasan yang lebih luas terhadap tujuan dan sistem yang akan bapak bangun terhadap kostra tani ini sehingga kita Komisi IV ini memahami secara menyeluruh tidak sepenggal-sepenggal terhadap kostra tani. Demikian ketua terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

3 menit kurang 45 detik, selanjutnya.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Belum saya suruh pak, silakan Pak Kristantus.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Kalau tidak diserobot, tidak disuruh.

Yang terhormat menteri Indonesia.

Ditengah anggapan kita dan ditengah memang kondisi real bahwa kelapa sawit sebagai komoditi penyumbang pendapatan negara yang terbesar, sangat disayangkan Pak. Petani yang sejahtera “petani sawit mandiri” ini secara khusus kepada Dirjen Bun. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 dengan turunannya keputusan menteri dan sebagainya, ini saya beranggapan masih mengandung pengertian yang sangat bias, bahkan didaerah salah tafsrir dan itulah yang menyebabkan konflik di bidang perkebunan kelapa sawit antara masyarakat yang bernaung dibawah perkebunan kelapa sawit perusahaan dengan kebun sawit mandiri terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa.

Oleh sebab itu saya melihat ini masih kurang pengawasan kita pak dirjen, kurang pengawasan kita terutama tentang pola perkebunan kelapa sawit, modusnya perlu saya sampaikan kemarin saya kundapil kalau ke Kalimantan Barat memang tugasnya menyelesaikan konflik perkebunan sampai-sampai saya mengatakan bahwa salah satu perusahaan yaitu PT MKS di Kecamatan Noyan Kabupaten sanggau mengatakan kalau bulan Juni ini tidak konversi akan perintahkan rakyat untuk panen massal dikebun anda, saya katakan demikian. Kenapa saya katakan demikian karena sudah 11 tahun belum konversi padahal sesuai dengan peraturan daerah kabupaten setempat 48 bulan harus sudah konversi dengan modusnya seperti apa? Modus seperti begini Pak Dirjen perusahaan perkebunan sengaja mengulur waktu konversi sampai 10 tahun, 11 tahun ada yang sampai 20 tahun. Mereka memberi dana talangan 150.000 dan itu hutangnya kepada beban petani,

oleh sebab itu tentu ini harus kita antisipasi. Berarti selama 7 tahun, selama 10 tahun perusahaan itu panen plasma, mereka memberi dana talangan 150 ribu, 100 ribu Pak Menteri itu masuk bon petani, hutang petani. Jadi sangat miris rasanya apalagi sekarang sawit naik, tetapi petani yang bernaung di bawah perkebunan swasta tidak menikmati naiknya harga sawit.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Krisantus.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Tidak menikmati minyak sawit, iya pak.

Itu saya pikir perlu kita kedepan revisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2014, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Nah itu Undang-undang perihal apa saya ingin tahu?

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Tentang perkebunan kelapa sawit bahwa perusahaan perkebunan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perkebunan sawit rakyat sebesar 20 %, itu bunyinya pak, tetapi masih bias.

KETUA RAPAT:

Itu saya rasa bukan 2014, itu sudah lama sekali mengenai kewajiban perusahaan plasma 20 %. Jadi 20 % itu adalah lahan milik masyarakat, hutangny ke bank, perusahaan sebagai avalist, nanti ada hitung-hitungannya misalnya dalam hitungannya setiap panen berapa-berapa hingga hutangnya selesai baru jadi sertifikatnya dibalikin ke pekebunnya, ituloh pak. Jadi kalau 7 tahun belum, iya mungkin dikesepakatannya dilihat dulu, nanti Pak Krisantus pulang kekampung ambil lihat kesepakatan plasma perjanjiannya bagaimana? Itu tidak bisa nuntut pemilik tetapi berkaitan dengan pihak ketiga yaitu perbankan.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Disana sudah ada kesepakatan pak, 48 bulan sudah konversi.

KETUA RAPAT:

Tidak mungkin, Pak Dirjen jawab berapa tahun kalau hutang plasma? paling cepat 8 tahun tidak mungkin kalau 48 bulan. Saya sangat paham, saya sangat mengerti mohon maaf 48 itu. Sekarang begini loh dia saja mulai panen pasir itu mulai tahun ke-4 menuju tahun ke-5 baru panen pasir, buah yang

kecil itu loh. Jadi kalau 48 bulan itu mungkin bapak salah info, apa salah baca atau salah dengar.

Jadi habis ini Pak Dirjen Perkebunan, tolong Pak Kristantus dibantu habis ini. Habis rapat ini diberikan jude lack, jude list-nya, dibuat perhitungannya kalau hutangnya kira-kira 1 hektar itu 40 juta ditambah bunga dibagi berapa? Berapa? Itulah hasilnya, iya? Mengenai nanti sipekebun plasma ini kerja dapat upah itu beda lagi, diluar kewajiban tadi dan diluar hak yang tadi.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Begini saja Pak Ketua saya minta bantu ketika terjadi konflik Pak Dirjen ikut saya.

KETUA RAPAT:

Jangan begitu nanti setelah pulang ini, selesai rapat ini bicara dulu dengan Pak Dirjen, bagaimana solusi terbaiknya, oke cukup? Kalau kurang jelas nanti tanya ke saya. Saya menjadi Ketua Komisi tidak bodoh amatlah, kalau masalah itu sudah paham saya. Selanjutnya tadi yang mau tanya? Iya Pak Sunarna silakan.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Menteri yang terhormat dan juga seluruh jajaran pejabat dari Kementerian Pertanian.

Terima kasih saya hanya bertanya mungkin tidak lebih dari 2 menitlah kira-kira.

Pak Menteri yang terhormat.

Terkait dengan Permentan Nomor I tahun 2020 inikan terkait dengan pupuk ini penurunannya sangat besar, pupuk subsidi ini. Nah, kalau bicara logika matematis benar, mungkin ada pengurangan lahan setiap tahunnya boleh, tetapi secara prediksi bahwa kalau kita mau berdaya dalam pangan mesti kita akan bicara indeks tanam. Kalau kita tanah itu berkurang, konversinya menambah lahan juga sulit. Bagaimana itu peningkatan indeks tanamnya Pak Menteri? Kalau bicara indeks tanam ini menaikkan otomatis bukan penurunan terhadap jumlah pupuk itu sendiri, karena kita setiap kabupaten akan dituntut untuk menaikkan indeks tanamnya Pak Menteri, otomatis kalau index tanam ini harus naik untuk swasembada pangan pupuk yang digunakan pun juga naik. Nah anehnya Bapak Menteri yang terhormat, bahwa disini bukan hanya pupuk yang anorganik, pupuk organik pun juga ada penurunan dari 948.000 ton turun menjadi 722.000 ton.

Nah bagaimana kita mau mengajari rakyat kita petani ini untuk beralih organic, kenapa semuanya berkurang? Nah ini tentu ada suatu hal yang perlu dijelaskan dan terjadi pengurangan ini tentu Pak Menteri pun harus mengumpulkan semua jajaran dinas dari setiap kabupaten ataupun provinsi untuk diperjelas. Kalau sampai ini nantinya gejala, apa langkah yang harus dilakukan? apabila target panen kita tahun 2020 ini tidak sampai tidak naik juga dan tidak bertambah tentu ada langkah-langkah yang mau dikerjakan.

KETUA RAPAT:

Pak Sunarna sudah 3 menit.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Ketua, saya kira itu Pak Menteri karena juga termasuk di Cilacap itu dapil saya itu 25.000 turun menjadi 18.200 ton tentu ini juga masalah tersendiri. Sekian terima kasih Ketua, Pak Menteri semoga Pak Menteri sukses selalu, *matur nuwun*.

Akhirul kalam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikum salam.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Merdeka!!

KETUA RAPAT:

Pak Sunarna yang menentukan kuota pupuk itu bukannya Pak Menteri, tergantung uang dari Kementerian Keuangan. Kalau Pak Menteri kalau dibilang maunya berapa? seribu juta ton, mau beliau supaya semua bagian. Tapi karena anggaran dari Kementerian Keuangannya terbatas kepada BUMN bahkan pemerintah pun punya utang dengan BUMN.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Tapi Pak Menteri punya Presiden kalau memang itu kurang untuk rakyat kenapa Pak Menteri diam saja? Minta dengan Kementerian Keuangan, kalau tidak ganti saja Menteri Keuangan itu karena rakyat adalah nomor 1. Kalau memang menterinya tidak setuju kenapa? Tentu itu menjadi pemikiran bersama. Jadi bukan berarti itu miliknya Menteri Keuangan benar? Tapi bahwa kementerian ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Cukup terima kasih.

KETUA RAPAT:

Besok bapak Rapat Banggar tolong bilang Menteri Keuangan kamu saya berhentikan. Saya lebih setuju begitu.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Saya setuju, karena saya memang di Banggar. Oke akan saya lakukan, terima kasih.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Ketua sedikit.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Ichsan dulu terus kemudian Pak Panggah sama Golkar, terus sudah begitu mungkin Pak Budi atau Pak Dedi. Silakan Pak Ichsan dulu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik Pak Ketua terima kasih.

Pak Menteri saya hanya 2 hal yang ingin saya sampaikan:

1. Terkait dengan produksi jagung Pak Menteri karena luas lahan untuk jagung 2020 itu sekitar 2,4 juta hektar. Saya hanya ingin mengingatkan terkait tentang impor gandum yang ketinggian ini Pak Menteri. Saya mensinyalir dan juga data dari ombusmend mengatakan bahwa kenaikan gandum itu disinyalir karena ada subsidi dari jagung ke gandum sepanjang tahun 2015 sampai 2019. Saya ingin menyampaikan bahwa data 2015 impor gandum kita 1,4 miliar US Dollar tapi 2018 impor gandum kita naik 3 kali lipat 4,2 miliar. Nah hal yang seperti ini pak saya hanya ingin menyampaikan sama Pak Menteri tolong pak kendalikan ini impor gandum ini pak, kalau perlu kita lihat tata kelola, kita tata kelola saja. Itu yang pertama.
2. Kedelai pak, saya mau tanya kepada Pak Dirjen, mohon maaf Pak Ketua boleh interaktif sebentar?

KETUA RAPAT:

Kalau untuk Fraksi Golkar bolehlah.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya hanya ingin tanya Pak Dirjen ini ada data terkait tentang pengembangan kawasan kedelai. Itu apakah perluasan lahan kedelai atau pengelolaan lahan kedelai? tidak saya mau tanya pak? Maksudnya ini apa pak?

KETUA RAPAT:

Dijawab pakai mike, supaya direkam.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pengembangan atau penanaman berarti areanya sudah ada ya?

DIRJEN:

Ada perluasan baru karena kalau melihat realisasi tahun lalu, tahun ini lebih meningkat.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik begini pak saya tidak percaya pak ada perluasan area baru pak. Luas lahan 2019 menurut data BPS itu 285.265 hektar pak sedangkan data yang ada untuk pengembangan kawasan kedelai tahun 2020 itu 300.000 hektar, berarti ada 15.000 hektar saja pak perluasannya. 285, 265 saya data berasal dari Pak Sekjen, hasil kesepakatan antara BPS dengan Kementerian Pertanian itu 285, 265, 285.000 265 hektar. Kalau pengembangan itu 300.000 hektar, dimana pengembangannya pak? produksinya tahun 2019 0,424 juta ton, tahun 2020 menurut data yang disampaikan Pak Menteri tadi sama 0,424 juta ton juga pak. Dimana pengembangannya pak?

Nah kebutuhan produksi kita, kebutuhan konsumsi kita sekitar 3,2 juta ton. Produksi kita itu 0,42 juta ton berarti ada impor sekitar 2,75 ton, ini bukan jumlah yang kecil pak, jumlah yang besar. Saya minta Pak Menteri 2,75 ini cukup besar. Tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa ada pengembangan, ternyata tidak ada pengembangan. Berarti kemungkinan besar 2020 kita akan melakukan impor juga 2,75 juta ton.

Nah saya minta Pak Menteri tolong kendalikan ini Pak Menteri. Tolong kendalikan karena tidak ada peluang untuk pengembangan kawasan kedelai tahun 2020 ada 300.000 hektar, luas lahan kita 285, 265 hektar. Berdasarkan data yang ada di Pak Sekjen, tidak ada sama sekali pengembangan kawasan kedelai tahun 2020, saya tegaskan disini. Jadi Pak dirjen jangan bilang bahwa ada pengembangan kawasan. Kalau 15.000

hektar itu pengembangan atau bukan? menurut saya bukan pak, hanya 15.000 hektar pengembangan kita. Berarti bisa dipastikan bahwa tahun 2020 kita impor lagi kedelai. Saya minta Pak Menteri tolong kendalikan impor kedelai ini pak, kita atur tata kelolanya. Itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ichsan.

Sekedar masukan untuk Pak Dirjen dan Pak Menteri, 2,7 juta ton itu kedelai itu regulasinya belum ada sampai hari ini, ada rekomendasi. Makannya tadi saya bilang tidak ada regulasinya di Kementerian Pertanian, harusnya paling tidak diatur, jangan semua impor. Importir ini enak saja, untungnya besar tidak ada kewajiban. Kenapa tidak dibalik? importir wajib menyiapkan, membantu bibit untuk pengembangan kedelai di Indonesia. Jadi jangan wajib tanam tetapi wajib membantu memberikan bibit kepada Kementerian Pertanian untuk disalurkan kepada masyarakat. Kalau selama inikan namanya PAKJALE; padi, jagung, kedelai yang lainnya ini semuanya *lose*, tidak ada kewajiban apa-apa bagi importir. 2,7 juta ton terbayang ga keuntungan mereka berapa? sementara kewajiban tidak ada. Itu yang harus kita pikirkan kalau harus bikin rumusan bersama, kita bikin rumuskan. Kalau perlu Undang-undangnya dirubah, kita rubah Undang-undangnya untuk kejayaan Republik Indonesia. Selanjutnya Pak Panggah, silakan.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Rekan-rekan semua, Pak Menteri serta jajarannya.

Tadi diawal rapat menyampaikan Pak Menteri *clue* terkait dengan kita ini jangan lagi berpura-pura yang artinya kita betul-betul memotret sesuatu itu dengan sebuah kejujuran. Saya melihat disini ada hal-hal yang masih belum tersentuh terkait dengan tupoksi dari Kementerian Pertanian itu sendiri pak. Kita tadi Pak Menteri mengharapkan dukungan dari kita semua di Komisi IV tapi saya belum melihat adanya suatu tupoksi yang tuntas terkait dengan misi dari Kementerian Pertanian itu sendiri yaitu meningkatkan produksi. Dalam hal ini misalnyakan didalam kontribusi produktivitas itukan pokoknya adalah mengenai bibit, yang kedua mengenai pupuk, yang ketiga mengenai irigasi kemudian yang lain-lain misalnya masalah penyuluhan dan lain-lain.

Lah misalnya masalah pupuk, inikan sudah satu fakta iya kecendrungan pupuk ini terutama adalah pupuk sintetik ini cepat atau lambat pasti subsidiya akan dikurangi secara drastic, boleh jadi akan dihilangkan. Gejolak ini sebenarnya sudah nampak berapa puluh tahun yang lalu atau

katakanlah beberapa tahun yang lalu belakangan, terlihat dari piutang yang terus meningkat, piutang pabrik pupuk kepada pemerintah yang terus mengalami peningkatan.

Oleh karena itu saya kira kita sudah harus bisa meninggalkan subsidi pupuk ini beralih kekreasi-kreasi pupuk yang lebih memberikan produktivitas nyata terhadap produksi pertanian, nah ini harus dipicu kesana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mindo banyak sekali beredar pupuk-pupuk sebenarnya yang bisa meningkatkan produktivitas ini diluar pupuk-pupuk yang secara tradisional sudah kita aplikasikan seperti pupuk yang bisa menyediakan nutrisi, enzim, hormon dan lain-lain tadi disampaikan oleh Pak Mindo iya terkait dengan pupuk-pupuk cair, pupuk organic cair, ini sudah beredar produk-produk pupuk organic cair yang secara nyata meningkatkan produksi. Hanya ini memang perlu intervensi, iya sekarang beredar bermacam-macam pupuk yang standarnya tidak jelas.

Nah ini telah mengacaukan produk-produk pupuk yang memang mempunyai standar yang memadai, ini saya kira harus dibenahi. Nah saya kira kalau kita bisa kreatif didalam bagaimana mem-*promote* pupuk-pupuk yang bagus ini, nah tentu ini akan memberikan produktivitas yang nyata. Kami sarankan ini supaya bisa dalam satu tangan, katakanlah ditugaskan saja ke BUMN untuk bisa menyalurkan atau mem-*promote* pupuk-pupuk yang memang secara nyata bisa meningkatkan produksi, itu saya kira.

KETUA RAPAT:

Cukup atau tidak?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Satu lagi soal bibit Pak Ketua. saya agak kurang setuju itu kalau pengembangan bibit dibebankan kepada importir karena kepentingannya agak beda ini sebenarnya, kalau importir itu inginnya impor sebanyak-banyaknya, kalau penugasan terhadap wajib tanam ataupun pengembangan bibit itu tujuannya adalah untuk menekan impor sekecil-kecilnya.

KETUA RAPAT:

Ini bicara bawang putih?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Iya misalnya bawang putih, jadi agak kontradiksi kebijakan ini. Lah ini bagaimana ini diselesaikan? Supaya kita tidak mengharapkan suatu yang kontradiksi sudah ketahuan hasilnya seperti apa, misalnya seperti itu pak. Mungkin itu saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, ada lagi? Supaya lebih cepat, lebih baik.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Cukup?

KETUA RAPAT:

Cukup, Jadi tadi Pak Panggah maksudkan kalau memungkinkan pupuk yang tidak subsidi an organic tadi itu oleh BUMN, begitu Pak Panggah? Pakai *speaker* pak.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Iya betul karena ini sudah tak terkendali iya sehingga tidak bisa membedakan mana yang pupuk berkualitas, mana yang memang abal-abal. Ini harus ditertibkan dan ditugaskan kepada BUMN untuk bisa menhandel ini.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti kalau ada apa-apa BUMN yang bertanggung jawab?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Iya betul.

KETUA RAPAT:

Karena ada temuan dari BPK juga Pak Menteri perihal pupuk an organic ini. Nanti datanya saya sampaikan dan ini sangat dahsyat sekali karena tadi itu diluar kendali begitu. ada lagi? Mau ngomong apa?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terakhir ini ketua.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota dan Bapak Menteri yang kami hormati.

Karenakan ini bagian dari sibungsu, jadi terakhir saja. Pertama terkait masalah tujuannya kepada Dirjen Perkebunan, disini untuk wilayah Madura terkait masalah pengembangan disini kami melihat ada terkait tentang perluasan pohon mente. Jadi kalau boleh kami usul untuk wilayah Madura ini perlu diperhatikan khusus pak, bukan hanya soal mente. Ini perwakilan dari Madura mba, jadi khas Madura sudah saya sampaikan.

KETUA RAPAT :

Sudah cukup?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Belum ketua. Jadi terkait masalah perkebunan yang ada di Madura, yang kami inginkan selain perluasan tanaman mente, kami juga mohon untuk diperhatikan masalah perluasan tanaman tembakau karena ini tidak termasuk dalam proses yang masuk dalam perkebunan. Yang kedua terkait masalah bibit jagung, kami minta untuk masalah bibit ini bukan hanya persoalan bibit. Yang kami inginkan bagaimana Madura ini mendapatkan suatu fasilitas khusus sehingga masyarakat bisa memiliki suatu fasilitas misalkan gedung untuk bisa gudanglah, untuk bisa menyimpan dan bisa memproduksi masalah hasil panen.

Dan yang ketiga, ini mungkin juga bagian usulan Pak Menteri terkait masalah aspirasi, terkait teknis ini mungkin bukan hanya menjadi keluh kesah bagi kami terkait usulan aspirasi khususnya anggota misalkan ingin mengajukan pengembangan didapil terkait teknis maupun administrasi ini perlu, sudah?

KETUA RAPAT:

Sudah cukup?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Artinya biar diperjelas Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah cukup? Cukup? Cukup? Saya barusan wa Pak Dirjen Perkebunan untuk Madura dibantu bibit tembakau pak, bukan untuk Slamet Bebek tapi untuk rakyat pak, tidak ini namanya Slamet Bebek. Selanjutnya dari BUMN ada yang mau disampaikan? cukup? kasihan bapak-bapak datang tidak datang hanya manggut-manggut saja.

Selanjutnya Pak Menteri ditanggapi sedikit kemudian nanti pertanyaan dijawab tertulis karena tadi kata, perintah Pak Hasan, Pak Dedi jawabannya tertulis nanti dikirimkan. Kalau memang, kalau memang belum pas jawabannya, kami akan memanggil Eselon I kembali. Karena ini untuk kebaikan, keterbukaan tidak ada dusta diantara kita, silakan.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Ketua Komisi dan Anggota Komisi IV DPR.
Bapak–bapak sekalian sama yang saya muliakan.

Yang pertama saya merasa sangat berterima kasih begitu banyak masukan yang saya tahu nilainya sangat besar, nilainya sangat berarti bagi perjalanan upaya-upaya pemerintahan khususnya dibidang pertanian yang ada. Kami akan catat sepenuhnya, kami akan jawab secara tertulis mungkin dengan lebih sistematis supaya bisa menyentuh apa yang menjadi harapan dari Anggota DPR yang ada sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang ada.

Sedikit tambahan menyangkut pupuk saja yang banyak dibicarakan. Sebenarnya kalau pupuk itu kepentingan nasional, memang Menteri Pertanian hanya menyikapi melalui RDKK yang masuk dari kabupaten, kabupaten keprovinsi keprovinsi kenasional kemudian kalau masih ada yang bersoal seperti Indramayu tadi ternyata setelah disesuaikan dengan RDKK yang masuk, setelah masih ada yang belum, dibuka kesempatan untuk melakukan setiap tanggal 25,26 untuk melakukan penyesuaian untuk disikapi kembali sesuai kebutuhan yang ada, 25 setiap bulan seperti itu.

Jadi ada ruang untuk melakukan penyesuaian dan pupuk organic seperti yang tadi disampaikan tidak betul turun, justru naik ini tahun pak. Jadi ini juga kadang-kadang informasi kita perlu penyesuaian-penyesuaian. Lapangan memang ada yang ternyata dari hampir 20,30 masalah yang masuk setelah kita sikapi sebenarnya ada kelemahan dilapangan dan ini biasa. Biasanya tertukar RDKK antara satu kabupaten dengan kabupaten lain dan itu porsi provinsi sebenarnya bukan porsi kami. Nah oleh karena itu sekali lagi pupuk itu masih kita bisa sikapi. Pendekatannya ada 2 misalnya untuk solusi jangka menengahnya itu kami lagi mengusulkan penambahan kuota sebenarnya seperti saran tadi Kementerian Keuangan bahwa ini pasti kurang karena seperti itu dan kami lagi menghitung sebenarnya, kita berdoa Menteri Keuangan bisa setuju dengan apa yang menjadi target-target kita Pak Ketua.

Kemudian kalau toh memang dilapangan secara real terjadi seperti tadi, sebenarnya saya hanya meneruskan pesan forum ini bahwa tidak boleh berpura-pura, tidak boleh bohong, saya hanya meneruskan itu dan ini menjadi komitmen kita. Kalau memang ternyata dilapangan kita butuh itu, kan bisa sambil jalan dengan anggaran yang ada dengan BUMN, ini kepentingan produktivitas dan ini adalah tanggung jawab pak, *insya allah*.

Jadi sebenarnya tidak ada yang low, cuma memang jangan kita buru-buru belum selesai 15 % yang diturunkan kita sudah merasa panic dan lain-lain dan ini kadang-kadang disengajakan menurut saya terkondisi seperti itu, itu menyangkut pupuk. Oleh karena itu saya masih optimis melihat apa yang ada, kita habis dulu yang ada sambil membuka peluang kalau misalnya seperti Indramayu sudah ada, sudah selesai, setelah disikapi masih kurang kita coba intervensi lagi toh ini untuk kepentingan rakyat.

Yang kedua tadi menyangkut holti dan lain-lain kalau ada penentuan-penentuan impor itu kami cuman menghitungnya apa yang menjadi kebutuhan. Sebenarnya yang menentukan izin impor itu di Menteri Perdagangan dan Menteri Perdagangan akan periksa hasil yang kita ajukan itu. Bukan kami yang menentukan begitu, akan ditentukan oleh mereka, ada

justifikasi yang harus dilakukan berapa gudangnya, seperti apa yang ada dan lain-lain dan kadang pengusulan yang ada selalu saja sesuai dengan usul, tidak bisa kita merekayasa usulnya dia itu mau seribu, kita naikkan sepuluh ribu tidak bisa, begitu kurang lebih. Tetapi mari kita sama-sama teliti, saya siap untuk kita saling mengoreksi apa yang ada. Teman-teman dirjen ini Eselon I saya, Eselon II saya pertegas memang tidak boleh lagi ada hal-hal mudah-mudahan kita bisa jaga sama-sama, walaupun ini bukan barang mudah untuk saya. Saya kira saya butuh bahkan back up dari Komisi IV untuk itu.

Kemudian bawang putih *insya allah* kami sebenarnya sudah mengeluarkan 103.000 ton dan ini masih yang keluar dari Menteri Perdagangan baru 80an, 60.000 tetapi ini masih terus berproses Ketua, masih terus berproses kita lihat dulu karena kalau kita tiba-tiba banjir saja kemudian ini hanya kepanikan publik nanti berlebihan sementara kita sendiri memang terus mendorong agar bawang putih local itu pada ketinggian tertentu masih mungkin begitu kok. Research-research kita juga lagi kerja.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Ketua, izin Pak Menteri pendalaman.

KETUA RAPAT:

Iya, iya silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Tindakan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian terhadap para importir yang nyata-nyata menyimpan barangnya atau menimbun barangnya pada saat masyarakat membutuhkan dengan hanya tujuan agar harga barang yang dia miliki semakin tinggi kenaikannya? apakah akan ada langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian karena tindakan ini sangat merugikan masyarakat, itu saja terima kasih.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H, M.H.):

Baik Bapak Ketua, jadi ada Satgas Pangan kita dan terdiri dari lintas sektor termasuk kepolisian sementara ini lagi bekerja tapi kendali penuh itu ada di Menteri Perdagangan bukan dikami pak, bahkan yang data mereka, dimana mereka simpan dan lain-lain ada di Kementerian Perdagangan tetapi kami tadi ini, tadi sebelum saya kesini itu yang kami desak tindak itu, tangkap itu, itu pak. Jadi seperti itu Pak Dedi cuman ini tentu itu ada sikap kita disana. Kemudian adakah alternatif selain Cina karena ada Corona disana? ada peninjauan kita langsung ke India, Bangladesh, Korea Selatan, Mesir, Amerika Serikat dan Uzbekistan jadi sudah ada seperti itu langkah alternatif, Uzbekistan. Kenapa Ketua tahu sekali ini?

Yang terakhir dari kami adalah kostra tani itu karena saya ini bekas kepala desa, bekas camat, suka yang komando-komando begitu itu gaya saja kalau mau ganti gantilah tidak ada masalah, tidak ada nilai politik disitu dan di era sekarang ini apa sih yang bisa ditanggung seperti itu? tidak pak, cuman memang saya melakukan program mohon bantuan bapak yang lebih tahu. Melakukan pengendalian dengan negara yang begini besar hanya bisa dengan IT, dengan digital system online system dan karena kompleksitas yang begitu besar, kami melakukan konsep yang melakukan yang seperti melakukan down. dan flat organizing dan pilihan yang paling tepat adalah dikecamatan begitu, itulah yang kami katakan dengan kostra tani sebenarnya BPP. Cuman BPP itu kan hanya penyuluh disana ada mulai dari hulu kehilir, kita perbaiki budi dayanya melalui ... AWR kami tembus, memang bandwitch-nya masih kecil Pak...tetapi kita pelan-pelan dan ini diakui oleh FAO yang paling bagus? kami coba bahkan MALE dan hitungan Rumpun Anakan itu kita bisa baca dari AWR dengan resolusi yang sekarang ini sudah masuk kepada 30x30, yang biasanya 50 sampai 100 ini sudah turun menjadi 6x6. Kami bisa baca agroklimaks disitu, kami bisa baca berapa kebutuhan pupuk disitu, analisa pupuknya ada. Saya undang bapak lihat sana dan ini kerja sama kita dengan internasional juga untuk...tidak mungkin kita bisa. Oleh karena itu kalau ada nanti pupuk yang bersoal.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Menteri, Pak Menteri berarti nanti penyiraman pupuknya sudah bisa pakai drone ya?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Bisa dan itulah tidak semua pak. Jadi kostratani itu mulai dari hulu sampai dengan sharing factory-nya kita bisa ukur disitu pak. Korsporasi pertanian itu bisa kita lakukan disitu per-*cluster* yang ada dikecamatan, maaf saya bekas Camat jadi saya tahu persis disitu ada kekuatan begitu, disitu juga melengket KUR kita. Yang mana katakanlah lada tidak perlu lagi naik keatas, keprovinsi ke Surabaya mungkin disitu sudah bisa pabrikasi yang disesuaikan dengan KUR. Ini memang masih ideal, kita masih berproses tapi harus dicoba, karena kebetulan ada KUR yang tersedia begitu.

Saya jujur katakan Ketua, saya cuman mencoba memberanikan diri bahwa 50 trilliun kamu harus pakai, mana dirjen kamu pakai sekian, kamu pakai sekian, mana programmu untuk itu. Jujur saya bilang alat kendalinya adalah teknis Perbankan, yang kita intervensi tidak boleh pakai bankcapbel yang berlebihan disitu, itu saja intervensi kita sebenarnya dengan konsepsi yang kita ukur begitu, sudah waktunya mereka ... kita ada disitu. Kami membagi cluster ada provinsi unggulan utama itu langsung berkaitan dengan ekspor, kalau ekspor itu ada lokasi dimana itu ekspor disitu intervensi, mekanisasi harus full system, irigasinya full system. Ada provinsi yang andalan berarti dia sudah dipersiapkan untuk memiliki kemampuan yang cukup. Ada dalam pengembangan, bisakah pengembangan dinaikkan? tidak bisa, mari kita dorong sama-sama kalau bisa mereka utama semua pada

dasarnya begitu. Jadi sekali lagi kostratani itu Indonesia pak tidak ada niat apa-apa disitu, tidak ada cuman gaya-gayanya saja, kalau mau ganti, gantilah, tidak ada masalah. Tidak ada demi *Allah*, yang ada itu adalah itu. Jadi disana itu ada koordinasi pengendalian. Pak gubernur, pak bupati kalau mau bicara dengan menteri kita bicara lokasi yuk.

Saya berkali-kali dapatkan bahwa ada masalah pupuk, Indramayu lagi saya cek ini pak, berapa sebenarnya di situ? Apalagi kalau ada kecamatannya, ada desa kita bisa tahu dimana pupuk ini karena semua pupuk yang ada baik provinsi itu ada labelnya. Kalau dia tertukar dari Kalimantan ke Sulawesi Selatan saya tahu ada barcode antara kabupatennya.

Nah seperti itu, kita sudah mulai jaga ini supaya tidak ada yang lari yang mestinya subsidi disini, lari ketempat lain tapi ini membutuhkan memang sebuah proses dan saya kira *insya allah* semua catatan-catatan ini menjadi catatan yang besar untuk saya pak termasuk apa yang harus dilakukan didalam mencoba sebenarnya program-program yang kami bagi disini ini, ini tinggal di evaluasi pak karena ini exexplain-nya juga ada pak, dimana tempatnya.

Jadi perwilayahan provinsi dan kabupaten tanaman apa, ada bagaimana proses penyiapannya mulai dari bibit, pupuk dan mekanisasi sampai dengan pasarnya *start up* semua, kami akan dorong di kostra tani. Salah satu yang sudah kerja sama dengan kita adalah tani hup dan lain-lain sebagainya. Anak-anak millennial kita dorong kesana pak dan sekaligus penyuluhan. Penyuluh kita, penyuluh itu tidak mungkin lagi kita bawa seperti zaman orde lama, orde baru membawa ke Jakarta semua untuk dididik keprovinsi, tidak melalui AWR pada hari-hari tertentu disitulah penyampaian persoalan yang ada di AWR hanya bandwitch. Tapi kita akan gunakan link karena semua penyuluh memegang android dan android akan kami kendalikan. Semua...yang diturunkan kita juga akan kendalikan sehingga kita bisa lihat *realtime* dia kerja untuk apa. Masih ideal memang tetapi mari kita lihat seperti ini karena ternyata setelah kita cek dimana daerahnya, kecamatannya apa desanya kita tahu, dimana sebenarnya pupuk itu berada, setelah dicek sebenarnya tidak ada, semua bicara yag asumsi dan analisa. Nah itu menyangkut kostratani saya kira bapak sekalian saya mencatat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak menteri untuk kostratani kan ada kecemasan tentang urusan politik. Oleh bapak ditegasin saja bahwa tidak ada cela rekrutment orang yang berafiliasi tolong ditegasin.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Tidak ada cela sedikitpun, tidak ada politik disitu. Politik adalah politik Indonesia dan politik atas sama-sama, insya allah. Itu pak saya kembalikan mungkin.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, pendalaman sedikit boleh Ketua?

Pak Menteri inikan kita bicara PAKJALE Pak Menteri kan? kostratani ini bukan hanya padi ya pak? Tetapi jagung dan kedelai juga ya? Atau padi saja? Maksud saya begini Pak Menteri, saya sudah menyampaikan terkait dengan jagung dan kedelai. Nah ini saya melihat saya punya kekhawatiran yang cukup besar terkait dengan produksi kedelai kita. Tadi saya sudah tanya dengan Pak Dirjen ternyata memang cuman 300.000 hektar dan tidak ada perluasan area lahan.

Nah kalau itu kemudian beban APBN-nya terlalu tinggi maka kita perlu ada cara lain untuk bagaimana menciptakan satu kondisi agar kita bisa swasembada. Swasembada ini selalu mimpi pak, 10 tahun terakhir ini Kementerian Pertanian ini selalu bermimpi untuk swasembada kedelai tapi luas lahannya tidak pernah berubah-ubah pak.

Nah kita harus punya tata kelola yang benar pak terkait dengan kedelai ini termasuk juga jagung pak. Ini gandum 1,4 naik menjadi 4,2 pak dalam waktu 3 tahun pak dan disinyalir itu merupakan konversi dari jagung kegandum artinya maksud saya luas lahan kita 2,4 juta hektar, betul ya Pak Dirjen iya 2,4 juta hektar? Semestinya idealnya 3 juta pak kalau kita mau produksi yang benar tapi karena keterbatasan lahan 2,4 begitu. Biasanya waktu tahun 2017 sepengetahuan saya itu sampai 3 juta hektar. Ini ya pak yang perlu maksud saya ini yang perlu kita alami karena swasembada itu memang harus menjadi penting, jangan sampai ada kesan swasembada tetapi kemudian luas lahan kita cuman 2,4 pak yang dibiayai oleh APBN, idealnya 3 juta pak.

Nah ini maksud saya perlu ada pengaturan pak jangan sampai kemudian kita impor terus tapi kemudian petani jagung kita itu menderita juga pak. Hari ini kita bagus pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Ichsan apakah itu tidak perlu nanti diperdalam dengan Dirjen Teknis setelah ini begitu?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke Ketua terima kasih.

½ menit saja saya hanya mengingatkan Pak Menteri tolong jaga petani kita, 3.150, tolong jaga itu pak tapi jangan diintervensi dengan gandum karena gandum itu 99 impor pak. Kalau kita tergantung dengan gandum

problem kita besar pak, apalagi 2020 krisis muncul dan ada persoalan anti daya beli pak begitu. Itu saja Pak Ketua terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ichsan.

Pak Slamet ada? Terakhir mungkin pak?

Pak Fransis, oke Pak Slamet dulu Pak ya?

Pak Fransis sebentar ya pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih pimpinan.

Jadi saya ingin menguatkan sekaligus juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri terkait dengan AWR yang dipresentasikan luar biasa mudah-mudahan niat baik ini menjadi penguat dan pembangkit serta meningkatkan kesejahteraan petani. Hanya kata terakhir tadi yang ingin saya sambungkan dengan keluhan dari bawah baik saya dengarkan sendiri maupun seluruh senior-senior tadi sudah menyampaikan terkait dengan nasib PPL pak.

Barusan tadi Pak Menteri menyampaikan PPL kita sudah punya android semua tinggal tidak perlu dikirim ke Jakarta mendengarkan itu. Yang jadi permasalahan justru itu pak, nasib PPL kita ga jelas, untuk beli pulsa bisa jadi dia juga tidak beli cash harus kredit, dapurnya juga tidak jelas, dia gajinya tidak jelas. Sehingga titipan saya, AWR akan bisa jalan, PPL ini menjadi ujung tombak menjadi peningkatan pemberdayaan petani tetapi jangan sampai dia juga jadi ujung tombok, ini yang menjadi masalahkan seperti itu. Dia jadi ujung tombak tetapi juga jadi ujung Lombok karena dia harus tidak masuk didalam.

Oleh karena itu sekali lagi menguatkan dari teman-teman yang diawal, mohon untuk dilakukan penguatan terhadap posisi PPL. Terimakasih Pak Menteri dan Pimpinan serta rekan-rekan yang lain.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Slamet.

Pak Fransis Sebentar.

Tadi kalau tidak salah ada keinginan untuk menyelesaikan rapat jam 18.00 WIB mengingat sekarang sudah jam 18.00 WIB dan kita akan masuk ke Magrib. Saya ingin pertama meminta persetujuan Teman-teman Anggota untuk menyelesaikan rapat ini sampai selesai. Kalau begitu saya mohon perpanjangan waktu dan kalau boleh kita terakhir Pak Fransiskus saya tadi sudah mengiyakan, membolehkan Pak Fransiskus dan setelah itu kalau boleh kita simpulkan, setuju? setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Pak Fransiskus silakan terakhir.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi terima kasih.

Pak Menteri, yang Pak Menteri jelaskan itu keren, tapi yang saya ingin lihat dari Pak Menteri itu adalah pernyataan teknokratis Pak Menteri. Kalau kita bicara soal konstatatani Pak Menteri, secara garis besar yang haruskan disiapkan itu adalah sistem dan manusianya. Inikan kita mau membangun sebuah konektivitas sistem yang mengharuskan adanya kesiapan manusia dan manusia yang harus disiapkan pertama itu setahu saya penyuluh, penyuluh ini ujung tombak, mohon maaf Pak Menteri.

Saya mau uji coba nanti pada saat saya reses, kita berinteraksi di AWR itu Pak Menteri. Saya di Pulau Rote misalnya atau di Sabu, saya ingin kira-kira kita berkomunikasi dan apakah itu memang terkoneksi secara baik atau tidak Pak Menteri? karena terus terang Pak Menteri dari segi kesiapan manusia saja, saya agak skeptis Pak Menteri karena itu kalau boleh ada beberapa hal yang saya mau usulkan:

1. Memang revitalisasi peran penyuluh itu harus dan hari ini menurut saya ini prioritas Pak Menteri.
2. Validasi data kalau penyuluhnya sudah oke, datanya baru bisa siap, itu baru bisa jalan.
3. Bicara penyuluh, bicara lagi kesejahteraan mereka Pak Menteri. Nah memang keren sih ide Pak Menteri itu bagaimana membangun sebuah sistem. Ini ada teorinya, teori strukturasi lah bagaimana memadukan agency dan actor, kita paham Pak Menteri tetapi itu hanya enak dimulut ngomongnya Pak Menteri. Makannya saya pingin sekali lagi, saya ingin uji coba pada saat saya reses.

Jadi Kang Dedi ini bukan persoalan politis, ini persoalan teknokratis dan saya ingin melihat sesi teknokratis dari seorang Menteri, Sahrul Yasim Limpo yang saya tahu membangun karir dipemerintahannya mulai dari bawah. Saya kira itu point saya, sekian dan terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Fransiskus

Pak Menteri mungkin ada tanggapan?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Begini, PPL itu menurut Undang-undang 32 itu dibawah bupati bukan dibawah kementerian. Ini yang sementara saya lagi terobos, seluruh upaya bahkan saya 3x datangi ke beberapa kementerian untuk mengurus itu, 14.000 orang yang belum terangkat tetapi jawaban yang ada, tetap mereka yang akan menentukan.

Yang kedua kalau kita mau merubah Undang-undang ini 5 tahun belum tentu PPL itu pindah dibawah pengendalian kita. Oleh karena itu saya menghadap Bapak Presiden untuk meminta supaya ada pelembutan dari pengendalian PPL itu. karena bagi saya PPL itu kopasus pertanian, kalau dia kalah, dia tidak akan mampu menembak dengan sasaran yang tepat. Oleh karena itu sependapat kita itu menjadi penting, kostrani intinya PPL, intinya PPL.

Oleh karena itu sementara saya ada kesepakatan Bapak Presiden mau menerima untuk dimasukan rancangan Peraturan Presiden untuk melakukan pelembutan. Sasaran yang ada pembinaan kepegawaiannya tetap di Bupati tetapi pendekatan fungsionalnya, teknis pertaniannya dibuatkan kelonggaran kepada kita untuk melakukannya, ini juga tidak gampang.

Kemudian kelemahan dari AWR itu adalah di bandwitch. Tidak semua daerah yang memiliki bandwitch yang cukup atau signal yang cukup atau frekuensi yang cukup. Nah disini memang terobosan-terobosan digital harus dilakukan dan ini berproses pak tidak bisa ini hari, ini hari kita baru 2 juta hektar. Jujur, ini yang harus kita berproses sampai 7 juta hektar dalam pengendalian dan ini sudah ada MOU-nya dengan Menteri INFOKOM untuk mereka yang mengusahakan bandwitch-nya, kita yang masukkan kedalam. Kerja sama dengan Telkom dilakukan karena semua signal melalui Palapa dia sudah kasih kita untuk bisa lakukan itu tetapi ini pun masih mempunyai kelemahan-kelemahan begitu.

Jadi kita coba Pak Ichsan, kita coba saja mudah-mudahan Pulau Rote bisa masuk kedalam situ, mudah-mudahan. Tetapi saya ini ada kendala awan, kendala apa tapi kita akan terobos dengan berbagai langkah yang ada.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Konfirmasi saja Pimpinan.

Sebelah kiri, konfirmasi saja tadi kalau Pak Menteri menyampaikan PPL tidak ada, itu mungkin yang PPL ASN iya pak ya? tapi setahu saya menteri itu ada THL kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

THL itu hampir sama dengan penyuluh swadaya artinya kita merekrut penyuluh pada daerah-daerah yang masih belum terangkat. Totally desa yang ada diatas 70 ribuan, kita penyuluh organic masih kurang lebih 42 atau 40 berapa ribu. Jadi sekitar itu sehingga ada penyuluh-penyuluh yang kita angkat disitu. Tidak sesuai dengan apa yang sudah ada. Kita tidak ada yang baru lagi, tidak ada, yang itu yang kita pakai.

KETUA RAPAT:

Izin Pimpinan hanya menambahkan.

Tadi Pak Menteri mengatakan THL sama swadaya itu sama? Pak Momon tolong kasih tahu itukan beda. Swadaya itu berasal dari masyarakat, THL itu dikasih honor dari APBN. Pak Momon kalau menterinya salah tolong diingatkan, jangan manggut-manggut takut diganti. Kita ini mencari kebenaran walaupun atasan saya salah saya tetap ngomong salah.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Saya salah ketua, saya salah.

KETUA RAPAT:

Harusnya yang sebelah kanan itu kasih tahu.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Pimpinan sedikit, boleh pimpinan?

Instruksi sedikit pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Dimana itu? Pak Kholid silakan pak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terima kasih.

Langsung saja untuk menyingkat waktu, diruang ini kita telah sepakat waktu Rapat RDP dengan Eselon I bahwa kita sepakat satu desa satu orang penyuluh. Terlepas tadi dari penjelasan Pak Menteri itu menyangkut dengan

hak kabupaten dan saya juga bangga pernyataan Pak Menteri bahwa penyuluh itu kopasusnya pertanian.

Maka pada forum ini saya ingin menyampaikan sesungguhnya Pak Menteri beserta teman-teman semua menyangkut kostratani sebenarnya yang kita lakukan kemarin malah berkembang diantara kami seolah itu politis, tetapi Pak Menteri tadi telah mempertegas bahwa kita lillahita'ala dan saya bangga dari awal Pak Menteri dipengantar menyampaikan bahwa kita mari untuk tidak bohong. Kalau istilah kami Orang Aceh Pak Menteri tadi mengajak kita cakap "serupa bikin"; "apa yang kita cakap, itu yang kita bikin" dan kami juga sependapat untuk itu.

Maka oleh karenanya pemimpin kita bersama bahwa satu desa satu penyuluh yang bapak anggap sebagai kopasus ini betul-betul terealisasi pada tahun 2020, agar apa? cita-cita kita bagaimana membangkitkan pertanian dapat terealisasi. Saya pikir ini komitmen kita apa yang kita lalui beberapa hari rapat dengan kementerian malah tidak ada Pak Menteri, ada Pak Dirjen kita sepakati kesimpulan-kesimpulan yang ada tolong itu juga cakap serupa bikin; apa yang kita simpulkan dijalankan dengan masing-masing, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Khalid. Saya rasa cukup ya, saya cuman ingin sedikit mengingatkan Pak Menteri kita ada kesimpulan keputusan RDP kita terakhir dengan Eselon I:

1. Tadi Saudara Kholid sudah mengemukakan bahwa kami Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan jumlah penyuluh untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh melalui peningkatan jumlah penyuluh swadaya atau pengangkatan THLTB lingkup kerja pertanian menjadi ASN3K serta memperkuat sarana dan prasarana penyuluhan yang sudah ada, itu yang pertama.
2. Ada juga keputusan kesepakatan kita bersama kemarin dengan Eselon I yang meminta Kementerian Pertanian untuk salah satunya menghindari penggunaan istilah baru. Tapi tadi Pak Menteri kalau saya tidak salah dengar sudah menyakinkan, sudah menjawab bahwa tidak ada unsur politis didalam program kostratani. Jadi atas dasar itu semoga Pak Menteri dan jajaran Eselon I benar-benar menjunjung tinggi keputusan kesimpulan yang telah kita sepakati bersama.

Bisa kita lanjut untuk keputusan kesimpulan?

ANGGOTA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Menteri telah menyampaikan jawabannya

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kita akhiri acara ini. maka kami bacakan rancangan kesimpulan Raker pada hari ini. Terima kasih oke kesimpulan keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan anggaran Eselon I Kementerian Pertanian tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jendral sebesar Rp1.861.679.000.046.000 menjadi Rp1.886.679.000.046.000.
 - b. Direktorat Jendral Tanaman Pangan sebesar Rp5.762.808.824.000 menjadi Rp5. 612.808.824.000.
 - c. Direktorat Prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp3.503.898.216.000 menjadi Rp3.403.898.216.000.
 - d. Badan penyuluh dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sebesar Rp1.700.617.131.000 menjadi Rp1.825.617.131.000.
 - e. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp663.563.546.000 menjadi Rp763. 563.546.000.

Anggota Komisi IV setuju? pemerintah?

Iya disesuaikan terima kasih.

2. Komisi IV DPR RI menolak rencana Kementerian Pertanian mempergunakan diskresi 10% dari total pupuk bersubsidi tahun 2020.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian merevisi kembali Permentan Nomor I tahun 2020 terkait dengan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.

Komisi IV? Komisi IV setuju? setuju? Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Yang Nomor 2 ini kayak tidak bahas tadi, maaf kalau saya yang tidak mengikutinya. Jadi tidak ada deskresi tentang 10% itu sebenarnya, itu teknis dalam rangka penyaluran yang paling terakhir disalurkan adalah 10 %. Jadi attack yang pertama itu ada 50%, ada 40 %, ada 10 % attack terakhir. Jadi bukan deskresi pak, itu cuman sistem saja. Jadi tidak ada, totally 100% yang disalurkan tetapi untuk melihat kalau nanti ada yang kurang, ada yang berlebih, ada yang 10% ini yang tersisa akan didorong. Jadi bukan disimpan, bukan tidak ini strategi saja, kenapa bunyinya seperti itu pak? minta maaf kalau saya salah.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Sudin.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Waktu itu disampaikan oleh Pak Sekjen dalam RDP cuman waktu itu karena tidak dijadikan kesimpulan. Iya berarti tidak ada deskresi dihapus saja, kan begitu paling gampang? iya toh. Setuju Pak Fauzi jadi tidak ada deskresi yang.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Izin pimpinan intrupsi sedikit.

Bukan tadikan ada masalah harga eceran itu, kita sepakat RDP sebelumnya harga HET-nya dinaikkan. Jadi kita harus konsisten juga dengan rapat sebelumnya, terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Deskresinya dihapus tetapi usulan untuk menaikkan HET berarti kalau HET-nya naik berarti pupuk bersubsidinya bertambah misalnya dari 1800 naik menjadi 2.000 kalau ada alokasi 2.000 dari HET kelebihan ini dikalikan sekian juta ton, bertambahlah pupuk bersubsidinya, itulah. Disamain saja, tidak boleh berubah dari RDP kemarin. Kita mengusulkan ya? kita mengusulkan.

KETUA RAPAT:

Jadi kita coba sesuaikan dengan kesimpulan keputusan RDP kemarin; Komisi IV DPR RI mengusulkan Pemerintah untuk merelokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Nah ini sudah ada di 7, maaf ini point 7 ini boleh ditarik keatas? baik tadi sesuai dengan arahan ketua kita hapus tadi dan kita usulkan yang baru kita bacakan dulu,

Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk merelokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi dan meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 yang salah satunya diperuntukkan bagi petani tambak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Komisi IV?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Kenapa kita mengusulkan? kita lagi berbicara dengan Pemerintah ini, harusnya kita kalau ada keputusan iya kita putuskan bersepakat misalnya begitu. Kok mengusulkan kan kita lagi berbicara dengan Pemerintah terus diforum mana kita memastikan bahwa itu dilaksanakan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Johan. Ada kata yang tepat?

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSYAH):

Meminta aja kali ya?

KETUA RAPAT:

Meminta kurang ini?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ketua, ketua.

Intrupsi ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar satu-satu, Pak Johan masih ada masukan?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Kalau misalnya sejujurnya itu berarti kita bersepakat?

KETUA RAPAT:

Tapi redaksionalnya dulu meminta bagaimana?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Sama saja kalau kita meminta tidak ada, inikan ada orangnya ada disini kita bersepakat atau tidak?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Urusan redaksional kita coba, Pak Sekjen biasanya paling pintar redaksional.

ANGGOTA:

Ketua.

KETUA RAPAT:

Izin ya sebentar, sebentar.

Saya rasa kemarinkan kita pas RDP juga Pak Sekjen menyetujui ini. Jadi pasti pasti tinggal redaksionalnya kita putuskan bersama.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Boleh saya bantu sedikit Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadikan Pak Rosihan inikan masalahnya adalah harus disampaikan kepada Pemerintah, Pemerintah itu bukan hanya Kementerian Pertanian tetapi juga Kementerian Keuangan karena uangnya tidak ada sama beliau. Jadi kita meminta nanti Saudara Menteri Pertanian bicara dengan Kementerian Keuangan bahwa kita akan menaikkan HET Rp200 ini akan meningkatkan volume seperti yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf Pak Johan saya hanya menjelaskan saja.

Iya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Inilah gunanya kita ada senior Ketua Pak Sudin, terima kasih ketua yang sangat bijak. Berarti Anggota Komisi sudah bisa kita setujui?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah, boleh pakai mix Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Setuju pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Oke 3, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah menyediakan cadangan pupuk nasional diluar alokasi pupuk bersubsidi sebagai upaya mitigasi resiko terhadap perubahan kebutuhan setiap wilayah, Anggota Komisi IV? Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Iya setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp5.757.944.602.211,00, antara lain:
 - a. Tahun 2017 sebesar Rp45.000.080.939.271,00.
 - b. Tahun 2018 sebesar Rp5.712.863.662.940,00.

Komisi IV setuju? setuju? nominalnya ini benar tidak? tolong diperhatikan.

PT Pupuk?

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Coba BUMN angkanya betul tidak segitu? kalau tidak dibayar juga dia ga bangkrut kok tetap jalan pabriknya.

KETUA RAPAT:

Pak Dirut Pupuk PI, silakan pakai mike pak.

DIREKTUR UTAMA PT PUPUK INDONESIA (HOLDING COMPANY):

Cocok pak.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, Pemerintah silakan pak.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Jujur saya belum kaji persis tapi karena ini sesuatu yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, kami akan bicarakan pada dasarnya saya setuju dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB terkait dengan permasalahan status pengangkatan tenaga harian lepas tenaga bantu atau THLTB, lingkup pertanian menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, Komisi IV setuju?

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Undang-undang dan *workshop* seluruh kegiatan Kementerian Pertanian sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR RI, Anggota? Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Iya, sudah dibahas, setuju.

KETUA RAPAT:

Luar biasa.

7. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengatur tata kelola kedelai dan gandum dalam rangka perlindungan petani kedelai dan jagung di Indonesia, Komisi IV?

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ketua, Pak Ketua inikan dari Pak Ichsan tadi ya, sudah pembicaraan lama sekali ini, mengapa gandum disebutkan?

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar biar Pak Mindo berbicara dulu.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Mengapa gandum disebutkan? Dulu itu ada keyakinan Kementerian Pertanian kita itu mampu menyiapkan jagung tidak boleh impor. Melambunghlah harga jagung ini sampai diatas 5.750 akhirnya nantikan harga telur akan naik, kan begitu tapi itu yang terjadi. Untuk mempertahankan kelangsungan industri peternakan maka komposisi pakannya diberubah, disubsitusilah jagung dengan gandum kualitas tertentu, sampai sekarang itu berjalan. Kalau itu berjalan terus ini peningkatan jagung ini kerja ini akan kurang bermanfaat nanti penerimanya siapa? Ovttekernya siapa? 50-50% pakan unggas itu seyogyanya kemarin-kemarin itu dari jagung dengan dirubah kegandum tidak sekian persen lagi karena nutrisinya berbeda, harganya lebih murah, itu yang terjadi.

Saya kira kearah itulah pikirannya Pak Ichsan sehingga membuat kalimat seperti ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mindo penjelasannya, Teman-teman Komisi IV apakah bisa disetujui? Pemerintah?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sedikit saya jelaskan masalah bergantian jagung dan gandum tadi Pak Menteri, ini yang melakukan masih ada disini semua. Iya kita masih jujur pelakunya ada disini, jagung cukup tidak untuk pakan? Cukup bahkan lebih dari cukup, nyatanya jagungnya tidak ada diganti gandum. Maka yang tadi itu saya katakan kepada Pak Menteri, Pak Menteri sudah sangat jujur maka Eselon I jangan seperti yang lalu lagi, saya ingatkan saja. Apapun temuan nanti akan saya sampaikan disini, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua.

8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah agar subsidi pupuk organic atau hayati memiliki kualitas yang telah disetujui Kementerian Pertanian dengan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kuantitas pupuk organic serta diberikan tepat waktu sesuai dengan besaran yang dibutuhkan, Komisi IV?

F-PKS (ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, ketua.

KETUA RAPAT:

Andi Akmal silakan pak.

F-PKS (ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Saya kira bukan hanya subsidi ketua karena kita ada acara pengadaan pupuk organic juga, Jadi mungkin pengadaan dan subsidi pupuk organik, ditambah ketua supaya betul-betul pengadaan yang tahun 2020 ini kualitasnya betul-betul kita yakini apa unsur hara atau unsur organiknya begitu, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih jadi.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Izin Pak Ketua.

Tadi saya menyampaikan itu Komisi IV meminta Pemerintah untuk menertibkan jenis pupuk organic yang beredar

KETUA RAPAT:

Pak Panggah itu maaf saya potong itu dikesimpulan Nomor yang terakhir itu masuk itu pak.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Ini lain ya?

KETUA RAPAT:

Lain pak.

Pak Fauzi silakan pak.

F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Saya ada ini pak dalam tata bahasa ini ada 2 kali pengulangan Pak Budi. Yang pertama disetujui oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kalau dia setuju Undang-undang tidak usah pakai selanjutnya lagi meminta Pemerintah bertanggung jawab artinya double pengertiannya disitu. Saya menginginkan ini di drop pak, lanjut kekoma serta diberikan tepat sesuai dengan besaran yang dibutuhkan, jadi tidak mengulang seperti itu. Terima kasih Pak Ketua yang baik hati.

KETUA RAPAT:

Baik saya rasa itu saran yang baik terima kasih Pak Fauzi, itu tolong bukan, bukan di depannya, selanjutnya sampai serta, iya. Baik saya ulangi.

8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah agar subsidi pupuk organik hayati. Maaf mohon ditambah usulan Pak Andi Akmal, pengadaan dan subsidi, maaf saya ulangi; Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah agar pengadaan dan subsidi pupuk organik hayati memiliki kualitas yang telah disetujui Kementerian Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta diberikan tepat waktu sesuai dengan besaran yang dibutuhkan.

Komisi IV setuju? Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

Terakhir.

9. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran pupuk organik cair yang tidak memenuhi syarat di masyarakat, selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempromosikan penggunaan pupuk yang terbukti meningkatkan produktivitas yang dikoordinir oleh BUMN.

Komisi IV? Pak Panggah ada masukan?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Mungkin karena ini berbicara pupuk organik cair, maka selanjutnya kalimatnya itu, selanjutnya; Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempromosikan pupuk organik cair kembali disitu. Penggunaan pupuk, mempromosikan penggunaan bukan disitu. Mempromosikan penggunaan Pupuk Organik Cair yang memenuhi standar dan terbukti meningkatkan produktivitas.

F-PD (MUSLIM, S.H.I., M.M.):

Sedikit Pimpinan.

Mungkin itu perlu ditambahkan diakhir tidak hanya BUMN, iya kasihan nanti padahal banyak juga masyarakat memproduksi Pak Menteri sudah memenuhi standar kalau tidak kasihan ini mereka banyak sekali kreatifitas anak-anak yang memang bagus-bagus ini lulusan IPB itu juga harus di akomodir Pimpinan yang memenuhi standar, artinya masyarakat juga terlibat.

KETUA RAPAT:

Jadi bisa kita, yang memenuhi standar dan terbukti meningkatkan produktivitas.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Siap ketua

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ini harus jelas juga, apa yang saya masukkan jelas, sesuai dengan usulan Eselon I. Eselon I ada yang mengusulkan?ada tidak pupuk cair ini. Dijawab dong bapak jangan kayak ketakutan pak.

DIRJEN:

Bukan ketakutan, jadi saya lagi baca kok mempromosikan begitu?

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bantu kasih masukan yang baik gituloh. Coba bagaimana karena jangan nanti tiba-tiba masuk karena ini bukan usulan Komisi IV loh, iya pupuk cair ini bukan usulan Komisi IV tapi idenya Eselon I, 3 Eselon I itu harus jelas.

Gimana kata-katanya coba diitu dulu, tapi yang Pak Panggah katakan juga tadi ada baiknya juga karena selama ini sangat bias sekali, begitulah jangan main hapus-hapus saja. Ini adalah permintaan dari mereka loh.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Ketua bisa saran?

KETUA RAPAT:

Silakan pak.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Dipoint 9 ini rasanya terlalu rigid, terlalu kaku banget. Yang ada itu mungkin menurut saya pupuk organik itu organik ada yang cair dan ada yang tidak cair dan sekarang sudah banyak diproduksi dimasing-masing provinsi dan daerah.

Nah yang harus dilakukan oleh Kementerian itu melakukan uji lab yang cukup pengawasan dan lab. Promosi juga bukan dikita pak, promosi jangan sampai dianggap kita ikut mempromosikan hasil produksi cair itu sehingga maksud saya jangan terlalu kaku dengan rigid begitu terlalu ngaturinya sampai detail sekali begitu. Jadi saya tidak tahu redaksionalnya seperti apa.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak.

Pak Panggah apakah ada masukan atau?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Berangkat dari beredarnya pupuk cair yang dimasyarakat ini tidak tahu lagi mana pupuk cair yang benar, mana pupuk cair yang tidak benar atau abal-abal padahal sesungguhnya pupuk cair ini juga banyak yang sudah terbukti itu mampu meningkatkan produksi. Nah ini kalau tidak dilakukan penertiban dan pembinaan, kan bisa masyarakat yang terjadi kebingungan, mana pupuk yang memenuhi standar, mana yang tidak memenuhi standar, itu intinya.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Panggah terima kasih.

Pak Sekjen mungkin ada rekomendasi pak supaya kita sama-sama enak pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Izin Pak Menteri,

Yang pertama masukan saya; Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran pupuk organik, cairnya dibuang, yang sesuai dengan standar mutu, inikan tidak memenuhi syarat di masyarakat. Saya usul yang sesuai dengan standar mutu karena standar mutunya sudah ada Permentannya;

KETUA RAPAT:

Jadi usulan Pak Sekjen; Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran pupuk organik yang sesuai dengan standar mutu dan terbukti meningkatkan produktivitas.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Ketua, salah.

KETUA RAPAT:

Ketua bagaimana ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Memenuhi standar mutu yang sesuai dengan standar dari Kementerian Pertanian. karena Kementerian Pertanian mempunyai standar nih kalau memang terbukti tidak benar berarti Kementerannya tidak benar, kan begitukan?jadi yang penting Pak Irjen ditambahin anggarannya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua.

Pak Ketua.

Izin edar itu ada di Dirjen PSP artinya pupuk itu baru bisa beredar itu kalau ada surat izin edar itu dari PSP dan itu biasanya sudah 2 kali uji lab dan itu sudah terbukti.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Mohon maaf dari Kapus PTTTP pak, izin. Jadi betul maksud saya yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan yang pasti dari Kementerian Pertanian begitu. Iya baik, oke langsung baik setuju. Untuk menertibkan peredaran pupuk organik agar sesuai yangnya diganti agar.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Itu menurut Deptan peredaran yang tidak sesuai justru yang harus ditertibkan itu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik pak.

Iya saya mengusulkan Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran pupuk organik agar sesuai dengan standar mutu dari Kementerian Pertanian.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Sebentar Ketua.

Saya Pak Ketua.

Pertanyaan saya adalah sudah seberapa mengkhawatirkan sehingga kita membuat rekomendasi seperti ini? Bukankah sekarang ini kita sedang mempromosikan penggunaan pupuk cair organik misalnya? Ada program...ada program apa bagaimana kalau mereka baru membuat itu? jadi pertanyaan saya adalah seberapa mengkhawatirkan sehingga kita membuat menertibkan produk-produk masyarakat yang kreatif misalnya seperti itu? Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ketua.

KETUA RAPAT F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Begini, dilapangan ini banyak pupuk organik yang abal-abal? betul tidak Pak Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Betul dan temuan kami hampir 30 %.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Maka kami bikin ini agar supaya jangan terulang lagi yang abal-abal itu bukan maksudnya mengekang masyarakat untuk kreatifitas, bukan. Karena cobalah di kampung saya, itu mana Gatot? Gatot mana Gatot? Pak Gatot itu

kalau dikampung saya lebih galak dari saya dia marah-marahnya karena banyak temuan pupuk organik yang abal-abal, baik itu kios, diapa, diapa banyak. Itu loh dicampur tanah sudah biasa, supaya bobotnya jadi berat. Maka ini jangan terulang lagi, maka ini dimasukkan. Itu pak paham pak? nah itu dong.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua, Pak Panggah kayaknya sudah terakomodir ya pak? maaf-maaf sebentar Pak Ansy dulu tadi ingin menyampaikan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Tidak ini redaksional saja, kalau menertibkan itu menertibkan hal yang buruk. Jadi Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran pupuk organik yang tidak sesuai dengan standar mutu dari Kementerian Pertanian selanjutnya merekomendasikan penggunaan pupuk organik yang sesuai dengan kualitas atau mutu bla, bla.

KETUA RAPAT:

Bla, blanya tolong diisi lah Pak Ansy.

F-NasDem (FAUZI H AMRO, M.Si.):

Pak Ketua saya rasa itu sudah cukup itu kalau dibla, bla lagi double-double dianya itu.

KETUA RAPAT:

Saya setuju, saya rasa cukup. Oke Nomor 9; Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk menertibkan peredaran pupuk organik yang tidak sesuai dengan standar mutu dari Kementerian Pertanian. Anggota Komisi IV? Pemerintah? Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Setuju, setuju pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Intrupsi Pimpinan, Pimpinan.

Pada kesempatan ini izinkan saya, saya melihat tadi belum satu kesimpulan kita bersama.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tampilkan lagi.

KETUA RAPAT:

Ditampilkan lagi, ditampilkan lagi.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Saya ingin mengusulkan palu ke-10, kesimpulan ke 10 juga mengikuti panah hatinya Pak Ketua. Sebagaimana yang Pak Sahrul Limpo sebagai menteri yang kita muliakan bersama, menyampaikan beliau sangat perlu dukungan kita, agar beliau sukses. Maka rasa sedih Pak Ketua selama ini ada agenda Kementerian didapil beliau tidak dikabari, itu juga harus menjadi perhatian kita. Maka kalau bisa pada kesempatan ini menjadi satu kesimpulan kita bersepakat, berkomitmen bersama setiap ada agenda kementerian diprovinsi itu juga diberitahukan ke Komisi IV minimal kepada anggota yang ada di provinsi tersebut. Karena tidak mungkin kita bisa berjalan bersama kalau kita tidak saling menghargai, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Khalid.

Baik saya minta untuk merumuskan kata-kata mutiaranya pak, langsung didikte

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Bapak Ketua, Pak Ketua

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar Pak Panggah.

Saya minta Pak Khalid usulnya dimasukkan dulu.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Komisi IV.

KETUA RAPAT:

Tolong dicatat.

F-GERINDRA (Ir. H.T. A. KHALID, M.M.):

Komisi IV sepakat dengan Kementerian bahwa setiap agenda kementerian, pokoknya setiap ada agenda kementerian di provinsi atau didapat disampaikan ke Komisi IV atau minimal kepada Anggota Komisi IV yang ada diprovinsi tersebut, begitu saja pak.

F-NasDem (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Itu yang baca bisa pingsan itu pak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Kalau bahasa lebih indah sama yang orang lebih puitis lah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk memberitahukan setiap agenda kegiatan kepada Komisi IV DPR RI itu saja, kan memberitahukan. Kegiatan provinsi dikunjungi, itu saja kalimatnya sudah susun, gampang itu.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Budi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Mindo.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Mungkin, saya usul saja ya.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Mindo silakan pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Dalam hal ini kita pakai kata-kata Orang Jawa; *mono ya ngono, ning ojo ngono* jadi tidak perlu kita masukkan dalam kesimpulan formal, tetapi itu masuk dalam catatan kita bersama, iya saya usul seperti itu

KETUA RAPAT:

Terima kasih, sebentar, sebentar.

Pak Khalid ya ini rapat resmi, Rapat Kerja. Iya saya kira melalui rapat ini kita sore hari ini ... paham dengan Pak Menteri dan Eselon I. Pak mohon nanti tolong setiap Anggota Komisi IV diberitahukan kalau ada kegiatan dari kementeriannya, saya rasa tidak usah.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi begini, Pak Menteri ini sangat agak kurang paham masalah kunjungan, yang salah ini Eselon I. Besok kunjungan, hari ini, sore ini staffnya kesekjenan wa staff anggota dari wa anggota baru keanggotanya. Kira-kira etis tidak? kalau saya cuman satu jawaban saya, kalau ga mau ngajak iya tidak usah ngajak. Saya tidak menyalahkan Pak Menteri, yang saya salahin Eselon I-nya. Jelas saya menerima berkali-kali. Jawaban saya, saya bilang sama staff saya, sampaikan kepada yang wa itu kalau ga mau ngajak tidak usah ngajak. Iya pasti setengah hatilah, besok mau berangkat, sore ini baru dikirimkan. Coba tanya Pak Sekjennya betul tidak begitu? Minimal kita ini saling menghormati dan saling menghargai, suruhan Eselon II, Eselon III kalau Eselon I-nya tidak sempat. Telepon Anggota infokan 2 hari lagi Pak Menteri mau kunjungan kesana bila sempat berkenaan gabung bersama-sama, ini tidak? Yang wa hanya stafnya Pak Momon tidak jelas, kadang staffnya pak ini Kepala Badan Karantina. Kalau saya begitu tetap tidak mau datang, bukannya apa. Saya hormati menteri, kita saling menghormati. Itu saja.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Pimpinan, pimpinan.

Saya mengusulkan itu karena sering kali kita masalah besar datang dari hal-hal kecil, kenapa saya usulkan ini? agar beberapa kali kita disini ada permasalahan yang disampaikan oleh ketua, ketua saja tidak dihargai apalagi kita, Anggota. Begitu nanti hal ini, ini akan menjadi sakit hati, setelah kita sakit hati nanti menjadi lebar permasalahan menteri tidak tahu, maka saya minta disini. Terlepas ini menjadi bagian kesimpulan tetapi ini menjadi komitmen bersama, ini maka perlu Pak Menteri, mungkin Pak Menteri tidak tahu ini, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Menteri silakan pak.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Saya kira ini sangat, saya harus hormati luar biasa karena justru saya butuhkan bapak dampingin saya, minta maaf. Jadi begini melalui kesempatan ini, saya setiap kunjungan kalau ada kesempatan dan berkenan, hari ini saya juga mengundang, saya ada bapak datang. Kadang-kadang ada masalah ketua izin, Ratas itu tiba-tiba dan terlalu sering.

Oleh karena itu takutnya kalau sudah mengundang ketua, sudah dipastikan datang kemudian kami tidak bisa pergi. Nah ini juga menjadi masalah sebenarnya cuman disitu persoalan bukan karena Eselon I atau Eselon tidak siap, kita siap didampingi kok dan selalu boleh tanya yang kebetulan mendampingi kami selalu happy kami dijalan, begitu pak. Jadi saya butuh bapak, bukan bapak butuh saya apalagi kedapil itu. Jadi saya akan coba perhatikan walaupun tidak tertulis, komitmen saya adalah mengundang bapak disetiap kesempatan yang ada.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri cocok. Iya Pak Johan. Cukuplah Pak Johan

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bukan, bukan jangan larang kita bicara.

KETUA RAPAT:

Terakhir ya Pak Johan ya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Tadi saya dan Fransiskus mengangkat suatu tema yang sama soal gagal panen dan gagal tanam dikaitkan dengan asuransi pertanian, inikan belum masuk nih disini. Kan ini persoalan yang dihadapi oleh teman-teman di Indonesia Timur yang sekarang ini dengan curah hujan yang tidak menentu. Jadi, saya usulkan supaya ini dimasukkan sebagai kesimpulan.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Ketua silakan pak

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Yang dimasukkan bapak apa asuransi? Sosialisasi?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bukan dipastikan dulu tentang asuransi pertanian itu sesuai dengan Undang-undang.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Asuransi pertanian itu ada, kemarin saya sudah bilang Eselon I kan? tolong dibawa diprintkan, tapi tidak ada yang bawa. Jadi paling tidak itulah pegangan beliau berdua pulang kedapilnya bertemu dengan petani, dengan rakyatnya sekaligus mensosialisasikan bahwa ada asuransi pertanian yang mana 1 hektar kewajiban anda 36.000 selebihnya disubsidi oleh Kementerian Pertanian, kan begitu pak? sekarang bisa tidak diprint?

DIRJEN:

Sudah dikumpulkan ketua disekretariat.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Mana sekretariat? yang asuransi pertanian itu tidak mungkin Pak Anton Priyono yang tanda tangan? Ini mengenai Upja, asuransi pertanian itu tahun berapa pak? bapak belum kasih.

KETUA RAPAT:

Tolong mikenya digunakan pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Begini saja, sekarang bisa dikasih tidak? Bisa tidak? Iya udah diperbanyak nanti dibagikan, kalau ini masalah Upja. Yang tanda tangan, saya belum duduk dsini.

DIRJEN:

Itu baru konsep yang kita kasih belum dia.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ini Upja ini ditanda tangani ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2008 Menteri Pertanian tertanda Anton Apriyantono.

F-PKS (ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua saya kira anggaran asuransi setiap tahun sudah ada, jadi saya kira kita nanti menyusul saja data-data daerah yang mendapatkan itu.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tidak begini Pak Andi, kemarin ini sudah saya mintakan, kan tidak lama lagi teman-teman mau reses pula paling tidak dibuat 2,3 lembar yang bagus sedikitlah, iya begitu saja. Apa syaratnya, apa haknya, apa kewajibannya, mengklaimnya bagaimana dan bayarnya dimana.

Kemarin saya sudah bilang loh kadang-kadang omongan begini loh, kalau masalah kata Pak Dawawi kanjeng ini; waktu saya jadi dirjen, habis catat sampai didepan gue buang, mang gue pikirin, silakan kalau dicatat nanti dibuang saya akan balik lagi akan saya tanyakan karena setiap apa saya rekam, ada dimeja saya. Dulu beliau jadi dirjen begitu, kalau Anggota bertanya tulis, sampai luar buang gue pikirin, Bapak/Ibu Eselon I boleh juga seperti itu.

Ketua karena jawabannya sudah saya hafal jadi saya buang Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Oh, iya. Cukup Pak Fransiskus? Pak Johan cukup? Segera dicetak sebaik mungkin, sejelas mungkin jangan pakai Bahasa Inggris karena orang kampung kadang-kadang petani belum tentu semua mengerti Bahasa Inggris, belum tentu.

Cukup?

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen mohon data yang dimaksud disampaikan secepatnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Raker ini kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam Raker hari ini, kami persilakan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami sangat muliakan,
Pak Sekjen, Para Dirjen dan Kepala Badan, BUMN Mitra Kementerian Pertanian, Hadirin sekalian.

Hari ini menjadi sebuah langkah yang lengkap bagi kami untuk besok mencoba melakukan akselarasi-akselarasi dari aktivitas pertanian kami.

Sekali lagi ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan jajaran Kementerian Pertanian hari ini bahwa diakhir perjalanan kebijakan 2020 langkah awal ini sangat mulus bagi saya melampaui espektasi yang saya perkirakan, saya sudah siap 2 hari 2 malam sebenarnya.

Saya sudah siap terima kasih Ketua Komisi, mudah-mudahan langkah awal ini jangan dibiarkan kami sendiri dan sekali lagi saya sangat mengundang Ketua untuk sekali-kali juga injak Kementerian Pertanian, kantor kementerian dan lihat AWR sekaligus disana kalau mungkin dijadwal Ketua. Kan saya sudah 3x makan dirumahnya Ketua, sekali-kali makanlah di Kementerian Pertanian itu, supaya dari sekarang.

Kemudian saya sungguh ingin kelapangan bersama Bapak, tentukan dapilnya dimana karena tentu tidak bisa seluruhnya tetapi kalau satu provinsi satu yang paling urgent dan kemudian kita sikapi lapangannya seperti apa.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri mohon disebut bukan bapak saja, ada Ibu-ibunya pak.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Saya kira itu pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saran saya Ibu jangan diajak pak, nanti ribet pak.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Saya dengan Ibu Luluk sudah sering sama-sama jadi cuman

ANGGOTA:

Ternyata ya ketahuan.

MENTERI PERTANIAN (Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Dan ternyata betul Ketua bersama Ibu-ibu cerewetnya 3 kali dari Bapak-bapak yang ada, semua ditanya, semua dia mau begitu jadi. Saya sekali lagi minta dikawal saya sangat serius mau melakukan ini, tidak gampang menjadi Menteri Pertanian, saya rasakan selama 3 bulan. Tekanan eksternal saya sangat besar dan saya berpijak kepada kebenaran *insya allah*, saya janjikan itu.

Saya butuh bapak-bapak justru untuk mengback up saya. Itu mungkin yang ada bahkan keresahan saya luar biasa di Maret-April pak, panen kami hampir 4 juta di Maret, April kemudian dia masuk sampai 6 juta ton itu membutuhkan kurang lebih 30 triliun. Kalau Bulog masih seperti sekarang, kita akan bersoal.

Oleh karena itu kami lakukan langkah kostra giling, ada 163 komando strategi penggilingan yang kami *hier* sekarang untuk bisa menyerap dan itu menggunakan KUR, seperti itu pak. Begitulah yang ada di Kementerian, tidak sederhana yang kita pikirkan seperti apa yang ada.

Oleh karena itu saya mohon kalau ada masalah pak, mari kita bicarakan bersama-sama lihat seperti apa dan kalau ada yang salah, tentu Ketua saya janji untuk merubahnya. Kalau tidak ada yang tidak benar dilapangan, kita luruskan sampai dengan memang kita katakan ini memang sudah harus kita hentikan kitapun siap begitu.

Saya masih percaya semua Sekjen bersama Dirjen, saya kerja keras sekarang untuk menyikapi 267 orang tidak boleh bersoal sama sekali makannya dan ini pertarungan kami yang luar biasa. Kami percaya ekspor kita masih ada, kami akan bersoal dengan kurang lebih 94 triliun ekspor kita ke Cina. Kita bersoal dengan 45 triliun impor kita dari Cina dan ini semua sesuatu yang tidak bisa dihindari dan kita harus jalan sama-sama. Terima kasih atas segalanya pada sore hari ini, ridho *Allah* bersama kita. Sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri, kami yakin Pak Menteri akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dengan demikian berakhir sudah Raker kita pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*.

Raker ini kami tutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.50 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001